



RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Painan, 28 Agustus 2025



KATA PENGANTAR

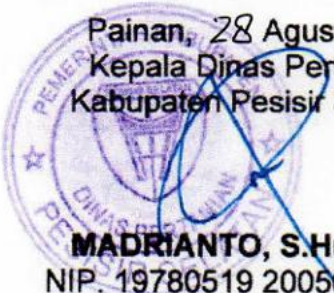


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dapat diselesaikan.

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan urusan pertanian tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 28 Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH....	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	79
3.3 Program dan Kegiatan.....	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	112
4.1 Renja Tahun 2026.....	112
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana/	

	Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan.....	112
BAB V	PENUTUP.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Per Triwulan II Tahun 2025).....	7
Tabel 2.2 (T-C.29)	: Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	13
Tabel 2.3	: Target Kinerja Indikator 1.....	24
Tabel 2.4	: Target Kinerja Indikator 2.....	25
Tabel 2.5	: Target Kinerja Indikator 3.....	25
Tabel 2.6 (T-C.30)	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	25
Tabel 2.7	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	45
Tabel 2.8 (T-C.31)	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan.....	51
Tabel 2.9 (T-C.32)	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	67
Tabel 3.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....	70
Tabel 3.2	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029.....	73
Tabel 3.3	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	

	beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	73
Tabel 3.4	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	78
Tabel 3.5	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..	80
Tabel 3.6	: Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	83
Tabel 3.7 (T-C.33)	: Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Pesisir Selatan.....	98
Tabel 4.1 (T-C.27)	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	113

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen rencana kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan Renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Renja perangkat daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja perangkat daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi perangkat daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah triwulan II tahun berjalan. Tahapan penetapan Renja perangkat daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja perangkat daerah dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 perlu disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 berpedoman pada:

- a) Rancangan RKPD; dan
- b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
- f) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- j) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; dan
- n) Peraturan Bupati Pesisir Selatan **Nomor** Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah:

a) Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah sebagai kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 yang terstruktur dan terukur, dengan tujuan untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta menjembatani kesenjangan

antara program dan anggaran untuk mencapai target kinerja dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

b) Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 bertujuan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian untuk mencapai visi dan misi daerah, serta sebagai tolok ukur kinerja dan alat bantu untuk mengarahkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Selain itu Renja tahun 2026 disusun untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, serta membantu dalam pengawasan kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pertanian;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
 - 3.2.1. Tujuan;
 - 3.2.2. Sasaran; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Renja Tahun 2026; dan
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana/ Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan capaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada triwulan II tahun 2025 mencapai 47,56% (Rp.9.386.552.170) dari total anggaran sebesar Rp.19.735.774.341 dan fisik sebesar 52,65%. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat realisasi anggaran dan fisik kegiatan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
(Per Triwulan II Tahun 2025)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Ket
		Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PERTANIAN	22.338.827.646	19.735.774.341	9.386.552.170,00	47,56	52,65	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.281.449.542	18.003.264.237	8.965.338.010	49,80	54,68	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>426.214.200</i>	<i>379.264.200</i>	<i>156.276.000</i>	<i>41,21</i>	<i>44,91</i>	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.188.750	22.208.750	11.396.000	51,31	55,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31.188.750	22.208.750	11.396.000	51,31	55,00	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.489.000	7.489.000	-	-	10,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.489.000	7.489.000	-	-	10,00	
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.489.000	7.489.000	-	-	10,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.489.000	7.489.000	-	-	10,00	
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.894.950	4.894.950	4.794.000	97,94	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.894.950	4.894.950	4.794.000	97,94	100,00	
	5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.152.500	337.182.500	140.086.000	41,55	45,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	375.152.500	337.182.500	140.086.000	41,55	45,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Ket
		Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.680.867.945	16.301.787.945	8.370.672.762	51,35	55,27	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.017.029.695	16.017.029.695	8.184.518.862	51,10	55,00	
	a. Belanja Pegawai	16.017.029.695	16.017.029.695	8.184.518.862	51,10	55,00	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	659.720.000	280.640.000	182.076.250	64,88	70,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	659.720.000	280.640.000	182.076.250	64,88	70,00	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.118.250	4.118.250	4.077.650	99,01	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.118.250	4.118.250	4.077.650	99,01	100,00	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.993.925	24.865.225	22.166.800	89,15	97,00	
9	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.993.925	24.865.225	22.166.800	89,15	97,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	49.993.925	24.865.225	22.166.800	89,15	97,00	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.049.812	14.599.812	880.000	6,03	19,17	
10	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.913.200	4.463.200	880.000	19,72	40,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.913.200	4.463.200	880.000	19,72	40,00	
11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.136.612	10.136.612	-	-	10,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	10.136.612	10.136.612	-	-	10,00	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.313.844	126.416.022	76.214.316	60,29	69,05	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.397.834	5.663.552	-	-	20,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	11.397.834	5.663.552	-	-	20,00	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.952.680	34.952.680	19.998.000	57,21	73,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	34.952.680	34.952.680	19.998.000	57,21	73,00	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.203.480	8.353.140	4.039.216	48,36	25,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.203.480	8.353.140	4.039.216	48,36	25,00	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	2.400.000	44,44	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	5.400.000	2.400.000	44,44	50,00	
16	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.850.000	4.950.000	1.456.500	29,42	40,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	14.850.000	4.950.000	1.456.500	29,42	40,00	
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.445.000	61.355.000	46.800.600	76,28	85,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	151.445.000	61.355.000	46.800.600	76,28	85,00	
18	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.064.850	5.741.650	1.520.000	26,47	30,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	10.064.850	5.741.650	1.520.000	26,47	30,00	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.262.500	28.175.000	-	-	25,00	
19	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.262.500	28.175.000	-	-	25,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	42.262.500	28.175.000	-	-	25,00	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.607.316	985.266.033	326.661.497	33,15	50,00	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	160.700.000	143.900.000	53.791.497	37,38	50,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	160.700.000	143.900.000	53.791.497	37,38	50,00	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.907.316	841.366.033	272.870.000	32,43	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	507.907.316	841.366.033	272.870.000	32,43	50,00	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.140.000	142.890.000	12.466.635	8,72	35,00	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.000	40.690.000	1.330.000	3,27	35,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	40.690.000	40.690.000	1.330.000	3,27	35,00	
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.200.000	91.200.000	9.111.635	9,99	35,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	91.200.000	91.200.000	9.111.635	9,99	35,00	
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.250.000	11.000.000	2.025.000	18,41	35,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	23.250.000	11.000.000	2.025.000	18,41	35,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Ket
		Sebelum Pergeseran	Sesudah Pergeseran	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	60.000.000	123.590.000	19.756.150,00	15,99	27,17	
9	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana	-	70.000.000	1.140.000	1,63	10,45	
	25 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	70.000.000	1.140.000	1,63	10,45	
	a. Belanja Barang dan Jasa	-	6.363.700	1.140.000	17,91	15,00	
	b. Belanja Hibah	-	63.636.300	-	-	10,00	
10	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	30.000.000	23.590.000	4.671.000	19,80	35,00	
	26 Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	30.000.000	23.590.000	4.671.000	19,80	35,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	23.590.000	4.671.000	19,80	35,00	
11	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	30.000.000	13.945.150	46,48	60,00	
	27 Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	30.000.000	30.000.000	13.945.150	46,48	60,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	13.945.150	46,48	60,00	
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	647.727.800	977.567.800	215.363.600	22,03	26,30	
12	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	647.727.800	677.567.800	213.373.600	31,49	35,00	
	28 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	647.727.800	677.567.800	213.373.600	31,49	35,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	647.727.800	677.567.800	213.373.600	31,49	35,00	
13	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	-	300.000.000	1.000.000	0,66	6,67	
	29 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	100.000.000	1.000.000	1,00	20,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	-	17.523.012	1.000.000	5,71	20,00	
	b. Belanja Hibah	-	82.476.988	-	-	20,00	
	30 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	200.000.000	990.000	0,50	19,04	
	a. Belanja Barang dan Jasa	-	38.535.632	990.000	2,57	15,00	
	b. Belanja Hibah	-	161.464.368	-	-	20,00	
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	26.342.410	24.469.910	1.455.000	5,95	55,00	
14	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.342.410	24.469.910	1.455.000	5,95	55,00	
	31 Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.342.410	24.469.910	1.455.000	5,95	55,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.342.410	24.469.910	1.455.000	5,95	55,00	
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	65.183.726	33.296.226	5.950.000	17,87	35,00	
15	Kegiatan Perizinan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.183.726	33.296.226	5.950.000	17,87	35,00	
	32 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	65.183.726	33.296.226	5.950.000	17,87	35,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.183.726	33.296.226	5.950.000	17,87	35,00	
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.258.124.168	573.586.168	178.689.410	31,15	41,24	
16	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.258.124.168	573.586.168	178.689.410	31,15	41,24	
	33 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	71.600.200	431.562.200	126.160.000	29,23	40,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	71.600.200	431.562.200	126.160.000	29,23	40,00	
	34 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	186.523.968	142.023.968	52.529.410	36,99	45,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	186.523.968	142.023.968	52.529.410	36,99	45,00	
	35 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3.000.000.000	-	-	-	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.091.531.600	-	-	-	-	
	b. Belanja Hibah	886.268.400	-	-	-	-	
	c. Belanja Modal	22.200.000	-	-	-	-	
	JUMLAH	22.338.827.646	19.735.774.341	9.386.552.170	47,56	52,68	

Dibawah ini dapat dilihat realisasi program/kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

A. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan II tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan II tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

C. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Sehubungan pelaksanaan kegiatan hanya baru sampai kondisi triwulan II tahun 2025, sehingga belum bisa dilihat capaian realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Capaian Target Kinerja

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja, diantaranya yaitu :

1. Semakin Berkurangnya SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Penyuluh Pertanian Lapangan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, dari tahun ke tahun jumlah penyuluh pertanian lapangan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya penyuluh yang

pensiun tanpa adanya penambahan penyuluh yang baru baik dari formasi PNS maupun PPPK.

2. Masih Rendahnya SDM Petani/Peternak.

Saat ini sebagian besar petani/peternak sudah berusia lanjut dan uzur. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap kualitas SDMnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan SDM petani/peternak adalah menumbuhkan kembangkan petani/peternak dari kalangan muda atau disebut dengan nama petani milenial.

3. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat

Penggunaan bersertifikat khususnya padi sawah sampai kondisi tahun 2024 masih rendah yaitu hanya baru mencapai $\pm 16\%$ dari total luas tanam.

4. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah Sapi Pesisir, Itik Bayang, Padi Varietas Bawaan, Jengkol Bareh Pessel dan Jengkol Lokan Pessel. Namun belum diusahakan secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman.

5. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Pakan Alternatif Untuk Pakan Unggas Dan Pakan Hijauan.

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Target Program

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan dam parit saluran, penerapan

teknologi pertanian dari penggunaan alat mesin pertanian dan benih ternak unggul membawa dampak pada program terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Implikasi yang timbul pada petani yang biasanya 1 kali tanam dalam setahun dengan adanya jaringan irigasi bisa dilakukan 2 – 3 kali tanam dalam setahun. Disamping itu juga dengan dilakukannya penerapan alsintan (alat mesin pertanian) dari pra panen sampai pasca panen lebih efisien dan efektif. Dan penggunaan benih ternak unggul telah dapat meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Faktor Penyebab Tersebut

Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan produksi pertanian maka perlu dilakukan bimtek untuk budidaya tanaman pangan, perlindungan tanaman terhadap OPT, peremajaan tanaman varietas unggul, bimtek bagi petugas medik veteriner dan para medik veteriter. Pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk peningkatan produksi dan peningkatan kualitas agar memiliki daya saing melalui bantuan benih/bibit tanaman bersertifikat atau jenis unggul dari alokasi dana pemerintah APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun Pusat. Pembangunan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan populasi ternak unggul.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja perangkat daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah s/d triwulan II tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel T-C.29) dibawah ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Targe Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	100,00	91,90			#DIV/0!	-	91,90	91,90
		PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
		KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
		JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100,00	99,16	-	-	-	-	99,16	99,16
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	188,00	94,00	47,00	47,00	100,00	47,00	188,00	100,00
3.27.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21,00	9,00	4,00	4,00	100,00	4,00	17,00	80,95
3.27.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	75,00
3.27.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	300,00	120,00	60,00	60,00	100,00	60,00	240,00	80,00
3.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	893,00	370,00	178,00	178,00	100,00	158,00	706,00	79,06
3.27.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertibnya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
3.27.01.2.03.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	39,00	-	13,00	-	-	13,00	13,00	33,33
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	100,00 20,00	100,00 5,00	- -	- -	#DIV/0! #DIV/0!	- 5,00	100,00 10,00	100,00 50,00
3.27.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	1.200,00	-	300,00	-	-	300,00	300,00	25,00
3.27.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48,00	-	12,00	-	-	12,00	12,00	25,00
3.27.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20,00	-	5,00	-	-	5,00	5,00	25,00
3.27.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1.200,00	-	300,00	-	-	160,00	160,00	13,33
3.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminitrasi Umum Perangkat Daerah (%) Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%) Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%) Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	100,00 100,00 98,00 100,00	100,00 25,00 95,00 25,00	- 25,00 1,00 25,00	- 25,00 1,00 25,00	#DIV/0! 100,00 100,00 100,00	- 25,00 1,00 25,00	100,00 75,00 97,00 75,00	100,00 75,00 98,98 75,00
3.27.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73,00	-	19,00	-	-	24,00	24,00	32,88
3.27.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15,00	6,00	3,00	3,00	100,00	3,00	12,00	80,00
3.27.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	750,00	60,00
3.27.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
3.27.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	20,00	-	5,00	-	-	-	-	-
3.27.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	260,00	23,00	88,00	-	-	78,00	101,00	38,85
3.27.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33,00	16,00	2,00	-	-	18,00	34,00	103,03
3.27.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	800,00	320,00	160,00	160,00	100,00	156,00	636,00	79,50
3.27.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	294,00	114,00	60,00	60,00	100,00	60,00	234,00	79,59
3.27.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
3.27.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114,00	991.713,00	487.867,00	487.867,00	100,00	535.308,00	2.014.888,00	76,78
		PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	53,72	53,14	0,19	0,19	100,00	0,28	53,61	99,80
		PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KWIHA)	73,62	70,17	0,57	0,57	100,00	1,79	72,53	98,52
		PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)	30,15	28,00	0,31	0,31	100,00	1,10	29,41	97,55
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Unit)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan (laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	60,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	75,00
3.27.02.2.01.0002.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	75,00	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	60,00	80,00
3.27.02.2.01.0006.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	45,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	33,33
3.27.02.2.01.0009.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	2.000,00	-	-	-	#DIV/0!	1.000,00	1.000,00	50,00
3.27.02.2.01.0014.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	45,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	33,33
3.27.02.2.01.0016.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	30,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	50,00
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	54,00	12,00	6,00	6,00	100,00	6,00	24,00	44,44
		Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (Kg)	50.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (Batang)	12.880,00	4.110,00	-	-	#DIV/0!	-	4.110,00	31,91
		Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	5.001,00	3.001,37	-	-	#DIV/0!	-	3.001,37	60,02
		Tersedianya bibit Perkebunan yang tersedia (Batang)	84.010,00	4.960,00	-	-	#DIV/0!	-	4.960,00	5,90
		Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-	2.000,00	19,05
		Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	75,00	61,92	4,33	4,33	100,00	4,33	70,58	94,11
3.27.02.2.02.0001.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)	12,00	-	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	66,67
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	6,00	-	2,00	-	-	2,00	2,00	33,33
3.27.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	25,00
		Jenis Pakan Ternak yang Tersedia (Jenis)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00
3.27.02.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	25,00
3.27.02.2.03.0002.	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	90,00	-	-	-	#DIV/0!	25,00	25,00	27,78
3.27.02.2.04.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengecer Obat Hewan yang dilakukan (%)	100,00	-	-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
3.27.02.2.04.0001.	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	68,00	-	-	-	#DIV/0!	18,00	18,00	26,47
3.27.02.2.04.0002.	Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00	10.500,00	-	-	#DIV/0!	-	10.500,00	100,00
		Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00	33,33	-	-	#DIV/0!	-	33,33	66,66
		Jumlah Ternak yang tersedia (Ekor)	71.149,00	10.924,00	-	-	#DIV/0!	-	10.924,00	15,35
3.27.02.2.05.0001.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	2,00	2,00	-	-	#DIV/0!	-	2,00	100,00
3.27.02.2.05.0003.	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	44.000,00	10.000,00	-	-	#DIV/0!	1,00	10.001,00	22,73
3.27.02.2.05.0004.	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/ Pakan yang beredar (Ton)	40.000,00	-	-	-	#DIV/0!	10.000,00	10.000,00	25,00
3.27.02.2.05.0005.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	40.000,00	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	10.000,00	25,00
3.27.02.2.05.0006.	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	25,00	10,00	-	-	#DIV/0!	-	10,00	40,00
3.27.02.2.05.0008.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	33,33
3.27.02.2.05.0009.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00	33,33	7,00	7,00	100,00	4,67	45,00	90,00
3.27.02.2.06.0002.	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	-	-	-	-	#DIV/0!	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!
3.27.02.2.06.0004.	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	30.000,00	-	10.000,00	900,00	9,00	10.500,00	11.400,00	38,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Targe Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114,00	991.713,00	487.867,00	487.867,00	100,00	524.579,00	2.004.159,00	76,37
		JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	2,00	1,62	0,08	0,08	100,00	0,18	1,88	94,00
		PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
		PERSENTASE PENGADUAAN/SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	75,00	75,00
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)	22.746,10	-	-	-	#DIV/0!	22.746,10	22.746,10	100,00
3.27.03.2.02.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3.27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Partanaman per Tahun (kali)	2,00	1,62	-	-	#DIV/0!	-	1,62	81,00
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskesmas yang representatif (unit)	3,00	3,00	-	-	#DIV/0!	-	3,00	100,00
		Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	76,51	74,77	0,58	0,58	100,00	0,58	75,93	99,24
		Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)	93,86	78,86	5,00	5,00	100,00	5,00	88,86	94,67
		Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian Yang Berkondisi Baik (%)	75,83	54,84	6,99	6,99	100,00	7,00	68,83	90,77
3.27.03.2.02.0001.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	40,00	27,00	-	-	#DIV/0!	-	27,00	67,50
3.27.03.2.02.0002.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	135,00	60,00	9,00	9,00	100,00	25,00	94,00	69,63
3.27.03.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	11,00	3,00	-	-	#DIV/0!	2,00	5,00	45,45
3.27.03.2.02.0006.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	10,00	10,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0007.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	15,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	33,33
3.27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	44,00	21,00	-	-	#DIV/0!	2,00	23,00	52,27
3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	60,00	-	1,00	-	-	20,00	20,00	33,33
3.27.03.2.02.0011.	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/ Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produkts Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0014.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	#DIV/0!
3.27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan oerasionalisasi Rumah	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.03.2.03.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	75,00	15,00	-	-	#DIV/0!	15,00	30,00	40,00
		Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang Dikelola (Jensi)	8,00	2,00	-	-	#DIV/0!	2,00	4,00	50
3.27.03.2.03.0001.	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	75,00	15,00	-	-	#DIV/0!	15,00	30,00	40,00
3.27.03.2.03.0002.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0001.	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditetapkan (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0002.	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang dikelola (Ha)	10.000,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.03.2.04.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140,00	155,00	-	-	#DIV/0!	-	155,00	110,71
		PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWANTERNAK (%)	4,91	4,28	0,21	0,21	100,00	0,19	4,68	95,32
		PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	5,00	4,35	0,05	0,05	100,00	0,36	4,76	95,20
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	3,37	3,23	0,10	0,10	100,00	0,12	3,45	102,37
3.27.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	30,00	30,00	-	-	#DIV/0!	-	30,00	100,00
3.27.04.2.01.0002.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30,00	30,00	-	-	#DIV/0!	-	30,00	100,00
3.27.04.2.01.0003.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	60,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	75,00
3.27.04.2.01.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0005.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0006.	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	60.000,00	-	2.445,00	2.445,00	100,00	20.000,00	22.445,00	37,41
3.27.04.2.01.0007.	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laoran)	45,00	-	15,00	15,00	100,00	15,00	30,00	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Targe Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.04.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Laporan)	15,00	15,00	-	-	#DIV/0!	-	15,00	100,00
		Jumlah Check Point yang Aktif (Unit)	12,00	1,00	2,00	2,00	100,00	3,00	6,00	50,00
3.27.04.2.02.0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	24,00	12,00	12,00	12,00	100,00	-	24,00	100,00
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	36,00	12,00	-	-	#DIV/0!	12,00	24,00	66,67
3.27.04.2.02.0007	Analisa Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisa Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	12,00	12,00	-	-	#DIV/0!	-	12,00	100,00
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)	21,00	7,00	5,00	5,00	100,00	5,00	17,00	80,95
		Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi (%)	100,00	58,33	16,67	16,67	100,00	16,67	91,67	91,67
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Udh dan Halal/ASUH (Jenis)	5,00	5,00	-	-	#DIV/0!	-	5,00	100,00
		Jumlah Jenis Produk Hewan yang diawasi (Jenis)	25,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	80,00
		Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner(NKV) (Unit)	6,00	1,00	-	-	#DIV/0!	2,00	3,00	50,00
3.27.04.2.04.0001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00
3.27.04.2.04.0003	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang ditetapkan (Laporan)	6,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	4,00	4,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkeemasan	Jumlah produk hewan segar berkeemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.05.0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Kota	Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
		Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	1.750,00	682,38	350,00	350,00	100,00	350,00	1.382,38	78,99
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	37.495,00	15.837,59	7.619,00	7.619,00	100,00	7.119,00	30.575,59	81,55
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani (Ha)	100,00	-	-	-	#DIV/0!	25,00	25,00	25,00
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	-	-	-	-	#DIV/0!	42.184,00	42.184,00	#DIV/0!
3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.27.05.2.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	75,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	45,00	60,00
3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190,00	190,00	-	-	#DIV/0!	-	190,00	100,00
		PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	40,00	30,27	-	-	#DIV/0!	37,00	67,27	168,18
3.27.06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	10,00	10,00	-	-	#DIV/0!	-	10,00	100,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	48,00	12,00	-	-	#DIV/0!	12,00	24,00	50,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	775,00	295,00	-	-	#DIV/0!	160,00	455,00	58,71
3.27.06.2.01.0001.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.06.2.01.0002.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	48,00	4,00	8,00	8,00	100,00	12,00	24,00	50,00
3.27.06.2.01.0004.	Sertifikasi unit usaha pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!
3.27.06.2.01.0005.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	775,00	145,00	150,00	150,00	100,00	160,00	455,00	58,71
3.27.06.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian Yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
		Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00
3.27.06.2.02.0001.	Penafusaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penafusaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0003.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	40,00	-	-	-	#DIV/0!	10,00	10,00	25,00
3.27.06.2.02.0004.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan/ Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.02.0005.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3.27.06.2.03.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	28,00	-	-	-	#DIV/0!	7,00	7,00	25,00
3.27.06.2.03.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen (laporan)	8,00	-	-	-	#DIV/0!	2,00	2,00	25,00
3.27.06.2.03.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi (laporan)	20,00	-	-	-	#DIV/0!	5,00	5,00	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	619,00	319,00	130,00	130,00	100,00	100,00	549,00	88,69
		JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	75,00
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (%)	100,00	40,00	20,00	20,00	100,00	20,00	80,00	80,00
		Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	46,39	28,07	7,17	7,17	100,00	6,34	41,58	89,63
		Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.536,00	1.694,00	438,00	438,00	100,00	1.115,00	3.247,00	58,65
		Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	92,50	79,17	4,16	4,16	100,00	3,67	87,00	94,05
		Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	91,88	76,88	4,62	4,62	100,00	6,63	88,13	95,92
		Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	48,88	48,88	-	-	#DIV/0!	-	48,88	100,00
3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	75,00	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	60,00	80,00
3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.536,00	1.694,00	439,00	439,00	100,00	1.115,00	3.248,00	58,67
3.27.07.2.01.0003.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	655,00	11,00	84,00	84,00	100,00	120,00	215,00	32,82
3.27.07.2.01.0005.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	97,00	30,00	38,00	38,00	100,00	18,00	86,00	88,66
3.27.07.2.01.0006.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	-	-	-	#DIV/0!	35,00	35,00	#DIV/0!
3.27.07.2.01.0007.	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	-	-	-	#DIV/0!	15,00	15,00	#DIV/0!
3.27.07.2.01.0008.	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk (Unit)	3,00	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	33,33
3.27.07.2.01.0009.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

a) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Hasil Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah laporan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Target Kinerja Indikator 1

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai AKIP perangkat daerah	Angka	89,98 (A)	90,43 (AA)	90,88 (AA)	91,34 (AA)	91,79 (AA)	92,25 (AA)

b) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Nilai kematangan inovasi perangkat daerah merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan nilai kematangan inovasi perangkat daerah adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Target nilai kematangan inovasi perangkat daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Target Kinerja Indikator 2

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Kematangan Inovasi perangkat daerah	Angka	91	92	93	94	95	96

c) Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK

Indikator nilai PDRB sektor pertanian ADHK digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Untuk menentukan nilai PDRB sektor pertanian ADHK adalah jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Target nilai PDRB sektor pertanian ADHK tahun 2025-2029 dapat dilihat seperti Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Target Kinerja Indikator 3

Indikator	Satuan	Target Tahun ke-					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK	Rp.	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885

Untuk lebih lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.30) dibawah ini.

Tabel 2.6 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Per Triwulan I Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	-	√	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	89,50 (A)	-	90,43 (AA)	
2	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	√	100	100	100	90	-	100	
3	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	-	√	3,1 Triliyun	3,16 Triliyun	3,23 Triliyun	3,05 Triliyun	-	3,23 Triliyun	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029, adapun permasalahan dan hambatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah:

a) Rendahnya Tingkat Pendapatan Petani

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Pesisir

Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani. Sesuai laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata pendapatan per kapita petani per bulan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.096.372, tahun 2022 sebesar Rp.1.255.288, tahun 2023 sebesar Rp.1.395.192 dan tahun 2024 sebesar Rp.1.395.192. Dari data tersebut dapat dilihat ada peningkatan pendapatan petani setiap tahunnya, namun jika dilihat dari tingkat pendapatan petani per harinya masih rendah hanya mencapai Rp.46.506,40 pada tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

b) Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan, banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian sangat pesat terutama lahan pertanian yang berada di sepanjang jalan raya.

Sebagai salah satu upaya menekan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan selain tanaman pangan, diatur dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam perda ini lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 25.219,20 hektar yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan total luas 17.944,25 hektar;
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan total luas 4.801,88 hektar; dan
- Lahan Rawan Konversi dengan total luas 2.473,07 hektar.

c) Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga masih sangat minim sekali. Potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan bahan pangan keluarga sangat besar sekali di Kabupaten Pesisir Selatan.

d) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian

- Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan melalui kegiatan Brigade Pangan (BP) yang diluncurkan Kementerian Pertanian tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan sebanyak 54 unit BP yang terdiri dari alsintan pra panen dan pasca panen yang tujuannya mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

- Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat. Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur.

Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Pada Tahun 2024, lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan seluas ±

6.492,17 hektar atau sebesar 27,18% dari total luas sawah 23.885,09 hektar (statistik pertanian tahun 2024), artinya masih sangat luas lahan sawah yang belum teraliri air irigasi dengan baik.

e) Rendahnya Penggunaan Benih Berkualitas Dan Bersertifikat.

Penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pada tahun 2024 penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat tanaman padi sawah baru mencapai $\pm 16\%$ dari total luas tanam padi sawah.

Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi sarana dan prasarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat. Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis tanaman tersebut. Sumber daya genetik lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah *Padi Sawah Varietas Bawaan* dan *Jengkol Varietas Bareh Pessel dan Lokal Pessel* yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu jenis tanaman asli lokal asal Kabupaten Pesisir Selatan.

f) Masih Tingginya Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Anorganik dan Pestisida

Penggunaan pupuk anorganik rata-rata untuk sekali musim tanam adalah 300 kg/ha dan pemakaian pestisida sebagian besar tidak sesuai anjuran.

Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terus menerus akan mengakibatkan:

- **Pencemaran Air**

Salah satu dampak paling serius dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia adalah pencemaran air. Limbah dari bahan-bahan kimia ini dapat mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.

- **Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

Selain dapat mencemari air, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian serangga yang penting dalam rantai makanan alami. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem alami dan mengurangi keanekaragaman hayati. Penurunan populasi serangga dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pertanian dan lingkungan secara keseluruhan.

- **Resistensi Hama dan Gulma**

Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan perkembangan resistensi pada hama dan gulma terhadap pestisida. Akibatnya, petani sering kali harus menggunakan dosis yang lebih tinggi atau jenis pestisida yang lebih kuat untuk mencapai efek yang sama. Ini bukan hanya meningkatkan biaya produksi tetapi juga memberikan tekanan lebih besar pada lingkungan.

- **Pengurangan Kesuburan Tanah**

Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah. Ini dapat mengurangi kesuburan tanah secara jangka panjang dan menyebabkan degradasi kualitas tanah. Tanah yang kurang subur mempengaruhi produktivitas pertanian dan memerlukan upaya ekstra untuk pemulihan kesuburan.

- **Dampak Kesehatan Manusia**

Selain dampak lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap residu pestisida pada makanan dapat meningkatkan risiko kesehatan manusia. Gangguan hormon, masalah reproduksi, dan risiko terkena kanker merupakan beberapa dampak kesehatan serius yang dapat timbul dari paparan ini. Kesehatan petani dan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia.

Meskipun pupuk dan pestisida kimia memberikan manfaat segera dalam peningkatan hasil panen, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tidak boleh diabaikan. Petani perlu mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan mempertimbangkan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Dengan memahami dampak negatif dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, kita dapat

melindungi lingkungan, meningkatkan kualitas tanah, dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara bijak, kita dapat mendukung pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

g) Belum Optimalnya Produksi Pertanian

Secara umum ada 2 (dua) cara upaya peningkatan produksi pertanian, yaitu (1) Ekstensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memperluas areal pertanian, dan (2) Intensifikasi Pertanian (peningkatan produksi pertanian dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada). Upaya intensifikasi salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas padi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 4,69 ton/ha, tahun 2021 sebesar 4,83 ton/ha, tahun 2022 sebesar 5,05 ton/ha, tahun 2023 sebesar 4,93 ton/ha dan tahun 2024 sebesar 4,59 ton/ha.

h) Terjadinya Gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Serangan OPT untuk tanaman padi yang paling besar adalah serangan hama wereng dan tikus yang hampir merata di setiap kecamatan. Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petan. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan

laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

i) Terbatasnya Ketersediaan Benih/Bibit Unggul Ternak

Setiap tahunnya Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan benih ternak (Frozen Semen/Embrio Sapi) sebanyak ± 10.000 straw dengan jumlah aseptor (sapi indukan) ± 25.000 ekor. Selama ini kebutuhan akan benih ternak tersebut ditunjang bantuan dari Provinsi dan Pusat, rata-rata setiap tahunnya kontribusi provinsi dan pusat adalah sebesar ± 8.000 straw atau hampir 80% dari total kebutuhan per tahunnya. Disamping itu di Kabupaten Pesisir Selatan belum adanya kelembagaan peternakan yang bergerak dibidang penyediaan benih/bibit unggul ternak.

j) Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Populasi Ternak

Ada beberapa upaya peningkatan populasi ternak, yaitu:

- **Inseminasi Buatan (IB)**

Kondisi saat ini tingkat kelahiran hasil IB di Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong rendah yaitu dibawah 50%. Merujuk hasil penelitian terhadap sapi bali, rata-rata persentase keberhasilan IB adalah mencapai 66,89%.

- **Penanganan Gangguan Reproduksi**

Gangguan reproduksi pada ternak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

Malnutrisi: Kekurangan mineral seperti selenium yang penting untuk fungsi reproduksi dapat menyebabkan kesulitan dalam proses reproduksi.

Penyakit Menular: Penyakit seperti IBR, BVD, dan Brucellosis dapat mempengaruhi kualitas sperma dan berahi.

Stress: Stress panas dan demam juga dapat mempengaruhi kualitas sperma sebelum disimpan untuk ternak.

Kesehatan Reproduksi: Kesehatan reproduksi yang buruk dapat menyebabkan anestrus dan penurunan fertilitas.

Manajemen: Buruknya sistem pemeliharaan dan tingkat kegagalan kebuntingan juga dapat menjadi penyebab gangguan reproduksi.

Dengan memahami faktor-faktor ini, peternak dapat melakukan penanganan yang tepat untuk mencegah gangguan reproduksi dan memastikan kesehatan reproduksi ternak.

- **Pengendalian Pematangan Betina Produktif.**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa ternak ruminansia besar betina produktif (sapi atau kerbau) dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian penyakit hewan.

k) Masih Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Produksi Pakan Ternak

Pakan ternak berkualitas adalah pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan spesifik hewan ternak. Nutrisi utama yang harus ada dalam pakan meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pada usaha peternakan rakyat, pakan yang diberikan umumnya sesuai dengan kemampuan peternak, bukan sesuai dengan kebutuhan ternaknya.

Pemberian pakan tentu bukan sekedar membuat ternak kenyang, karena kenyang bukanlah standar bahwa kebutuhan nutrisi akan ternak terpenuhi. Rasa kenyang bukan pula hanya berbicara tentang jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak, akan tetapi kandungan nutrisi pakan juga sangat berpengaruh. Aktivitas makan oleh ternak berkaitan dengan sistem saraf (neuro system), melibatkan central nervous system (CNS) yang mengontrol tingkat konsumsi energi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan ternak, atau dalam bahasa sederhana ternak tidak akan berhenti makan jika kebutuhan energinya tidak tercukupi. Hal ini berkaitan dengan kualitas pakan karena dengan tersedianya nutrisi yang cukup akan dapat memenuhi kebutuhan energi ternak. Di Kabupaten Pesisir Selatan para peternak masih sangat minim penggunaan teknologi fermentasi pakan sebagai cadangan pakan yang berkualitas.

I) Belum Optimalnya Penanganan Penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) Dan Zoonosis

Penyakit hewan menular strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tinggi pada hewan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial, serta dapat menular ke manusia. Definisi Zoonosis

Zoonosis adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Zoonosis dapat berasal dari hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Potensi berkembangnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di Kabupaten Pesisir Selatan sangat besar seperti jembrana, LSD, penyakit mulut dan kuku dan rabies.

Tahun 2020 kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis sebanyak 2.194 kasus, tahun 2021 sebanyak 2.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 9.925 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.860 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.944 kasus. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan atas kejadian penyakit hewan menular strategis sampai 261,83% jika dibandingkan dengan tahun 2021 karena terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis harus menjadi program prioritas bagi bidang yang menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

m) Masih Kurangnya Perlindungan Masyarakat Dari Segi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sampai tahun 2024, jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 (tiga) unit dari total 14 (empat belas) unit usaha. Salah satu faktor belum adanya unit usaha pangan asal hewan yang memiliki Sertifikat NKV yaitu belum adanya Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi syarat untuk penerbitan NKV. Diharapkan dengan telah dibangunnya RPH ini, seluruh unit pangan asal hewan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Sertifikat NKV sampai tahun perencanaan berakhir.

n) Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman

Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah yaitu padi sawah varietas Bawaan, jengkol varietas Lokan Pessel dan Barih Pessel, sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian sumber daya genetik hewan/tanaman tersebut.

o) Belum Optimalnya Diversifikasi Pengembangan Usaha Komoditas Pertanian

Pengembangan komoditas pertanian menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi produk pertanian.

p) Keterbatasan Akses Petani Terhadap Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang

menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

q) Terbatasnya Kualitas SDM Petugas Dan Petani Serta Kapasitas Kelembagaan Petani

Kualitas sumberdaya manusia petugas masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang, kondisi tahun 2025 jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 84 orang dan diperkirakan sampai tahun 2030 jumlah PPL hanya

tinggal 54 orang sehingga luas wilayah Kabupaten yang terdiri atas 182 Nagari tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada disamping itu juga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur di Kecamatan. Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.

r) Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan Pertanian dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi dan pelayanan kesehatan hewan kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

s) Standar Kualitas Produk Pertanian Belum Memadai

Saat ini masih banyak produk pertanian yang belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh pasar, baik domestik maupun internasional.

t) Persaingan Pasar Dan Ketidakstabilan Harga Produk Pertanian

Sektor pertanian sangat ketat dalam persaingan pasar dengan produk dari daerah lain yang sudah lebih maju dalam proses hilirisasi dan ketidakstabilan harga.

dimana fluktuasi harga produk pertanian dapat mempengaruhi keuntungan dari kegiatan hilirisasi.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, Seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah turunan dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang merupakan gambaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 dalam pencapaian target pembangunan di sektor pertanian guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat terkait langsung dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparaturnya pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Misi 3 : Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa

faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi salah satu bahan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan.	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Birokrasi Yang Efisien, Adil, Dan Berkinerja Tinggi	Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum berjalan optimal	Masih rendahnya SDM ASN	Pendidikan dan latihan bagi ASN
	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.	Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif .	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) i. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak j. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak k. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak l. Belum optimalnya penanganan penyakit	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian k. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul l. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak m. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis n. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsid j. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan k. Ketersediaan sumber

			PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis m. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner n. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman o. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian p. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan q. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani r. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan s. Standar kualitas produk pertanian belum memadai t. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) o. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis p. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal q. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian r. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani s. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang t. Rendahnya kapasitas petugas dan petani u. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan v. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak w. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran x. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	daya pertanian l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura n. Sinergisitas antar perangkat daerah o. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat p. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan q. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar r. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek s. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan t. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
--	--	--	---	---	---

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, dipengaruhi oleh faktor internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (*STRENGTHS*)

1. Tersedianya Lahan Sawah seluas 22.832 Ha;
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Adanya Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;

4. Tersedianya Sumber Daya Manusia sebanyak 278 orang, yang terdiri atas PNS, PPPK, dan Non ASN;
5. Tersedianya Kelembagaan Kelompok Tani sebanyak 2.232 unit dan Gapoktan sebanyak 159 unit;
6. Tersedianya Balai Benih Induk dan Brigade Alsintan;
7. Tersedianya 15 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan 7 unit Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan); dan
8. Adanya teknologi spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kelemahan (*WEAKNESSES*)

1. Rendahnya Mutu/Kualitas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan;
2. Masih rendahnya pemakaian benih bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Masih rendahnya ketersediaan benih unggul ternak;
4. Masih rendahnya sarana pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pertanian/Perkebunan dan Obat-obatan serta vaksin hewan/ternak;
5. Masih banyaknya Jaringan Irigasi tersier yang rusak;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi spesifik lokasi Pertanian/Perkebunan/Peternakan;
7. Masih ditemukannya penyaluran pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran;
8. Masih terbatasnya modal petani/peternak dalam melakukan usaha tani yang berorientasi agribisnis;
9. Masih kurangnya alat mesin Pertanian/Perkebunan/Peternakan; dan
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas ASN.

Peluang (*OPPORTUNITIES*)

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai;
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Adanya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian;
4. Tersedia IPTEK pertanian terapan;
5. Peluang pasar yang masih terbuka/meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
6. Letak geografis Pesisir Selatan yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional;
7. Potensi sumberdaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir; dan
8. Potensi SDM petani millennial dalam mendukung pembangunan pertanian.

Ancaman (*THREATS*)

1. Rendahnya minat para pemuda/pemudi berusaha dibidang pertanian, sementara saat ini para petani yang ada sudah berumur diatas $\pm$ 55 tahun;
2. Pemilikan lahan usaha tani relatif sempit;
3. Degradasi sumber daya lahan dan air;
4. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif;
5. Rendahnya minat petani untuk menggunakan benih bersertifikat;
6. Biaya produksi usahatani masih tinggi;
7. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim serta penyakit hewan dan ternak;

8. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian;
9. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
10. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan tani;
11. Daya saing produk masih rendah; dan
12. Berkembangnya pasar bebas.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Catatan Strategis Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun isu-isu penting dan catatan strategis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pendapatan petani;
- 2) Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan;
- 3) Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur, buah dan biofarmaka;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur) pertanian;
- 5) Peningkatan penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat;
- 6) Semakin berkurangnya unsur hara dalam tanah;
- 7) Rendahnya produktivitas pertanian;
- 8) Pengendalian Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- 9) Peningkatan benih/bibit unggul ternak di masyarakat;
- 10) Akselerasi peningkatan populasi ternak khususnya pada sapi dengan optimalisasi Inseminasi Buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif;

- 11) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak;
- 12) Optimalisasi penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
- 13) Peningkatan perlindungan masyarakat dari segi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 14) Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman;
- 15) Diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian;
- 16) Peningkatan akses petani terhadap pembiayaan;
- 17) Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- 18) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian dan pelayanan kesehatan hewan yang representatif dan strategis;
- 19) Peningkatan kualitas produk pertanian; dan
- 20) Stabilitas harga produk pertanian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih spesifik dan terukur yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Program prioritas dan karakteristik Dinas Pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Daerah dalam penanganan

urusan bidang pertanian. Dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan pertanian penyusunan program dan kegiatannya mengacu kepada program prioritas dan karakteristik Dinas Pertanian yang selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Usulan Para Pemangku Kepentingan.

Usulan para pemangku kepentingan meliputi usulan hasil musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

3) Hasil Forum Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja tahun 2026 ini, hasil forum perangkat daerah juga dijadikan salah satu indikator dalam membuat rancangan awal rencana kerja perangkat daerah. Usulan yang selaras dengan rencana kerja Dinas Pertanian baik itu program prioritas, karakteristik maupun arah kebijakan akan diakomodir dalam Renja Dinas Pertanian tahun 2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.8 (T-C.31):

Tabel 2.8 (TC.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	DINAS PERTANIAN					DINAS PERTANIAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				44.673.250.695	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				44.673.250.695	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.677.515.695	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.677.515.695	
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,5	19.677.515.695	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,5	19.677.515.695	
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	91				Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	91		
			Jumlah Inovasi (Inovasi)	7				Jumlah Inovasi (Inovasi)	7		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.000.000	
	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	76.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	76.000.000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	15.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	5.000.000	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	20.000.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	20.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	10.000.000	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	10.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	7.000.000	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	7.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	5.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.145.165.695	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.145.165.695	
	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.145.165.695	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.145.165.695	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.016.405.695	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.016.405.695	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.016.405.695	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.016.405.695	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				124.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				124.560.000	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	124.560.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	124.560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.200.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.200.000	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.200.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				60.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				60.000.000	
	Terlindunginya barang milik daerah dengan baik		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	60.000.000	Terlindunginya barang milik daerah dengan baik		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	60.000.000	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	50.000.000	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	50.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.600.000	
	Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	146	44.600.000	Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	146	44.600.000	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pessel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	25.000.000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pessel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	25.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				14.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				14.600.000	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	146	14.600.000	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	146	14.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				451.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				451.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	451.400.000	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	451.400.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.000.000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				145.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				145.000.000	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	145.000.000	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	145.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	250.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	250.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.465.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.465.000	
	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	350.465.000	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	350.465.000	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pessel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	50.000.000	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pessel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	50.000.000	
	Pengadaan Mebel				146.972.000	Pengadaan Mebel				146.972.000	
	Tersedianya Mebel	Kab. Pessel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37	146.972.000	Tersedianya Mebel	Kab. Pessel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37	146.972.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				153.493.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				153.493.000	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	153.493.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	153.493.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.821.270.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.821.270.000	
	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.821.270.000	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.821.270.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.270.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.270.000	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	151.270.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	151.270.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.670.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.670.000.000	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.670.000.000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.670.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				728.615.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				728.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	728.615.000	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	728.615.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.915.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.915.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.915.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.915.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				574.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				574.800.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	574.800.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210	574.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.900.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	35.900.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	35.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	62.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	62.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.462.292.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.462.292.000	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	6.462.292.000	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	6.462.292.000	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5		
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1				Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5		
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22				Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				4.477.292.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				4.477.292.000	
	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	4.477.292.000	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	4.477.292.000	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	5				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	5		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	1				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2.812.462.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2.812.462.000	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	2.812.462.000	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	2.812.462.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				78.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				78.000.000	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	78.000.000	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	78.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				100.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				100.000.000	
	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30	100.000.000	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30	100.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	1	200.000.000	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	1	200.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				287.665.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				287.665.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1	287.665.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1	287.665.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1	200.000.000	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	1	200.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				100.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				100.000.000	
	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000	100.000.000	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000	100.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				60.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				60.000.000	
	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000	60.000.000	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Pessel	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000	60.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				200.000.000	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1	200.000.000	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1	200.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				404.165.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				404.165.000	
	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1	404.165.000	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1	404.165.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				35.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				35.000.000	
	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	5	35.000.000	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	5	35.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000	
	Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman		Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	1	150.000.000	Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman		Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	1	150.000.000	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2		
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				100.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				100.000.000	
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Kab. Pessel	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	100.000.000	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Kab. Pessel	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	100.000.000	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				50.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan				50.000.000	
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Kab. Pessel	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	1	50.000.000	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Kab. Pessel	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	1	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				30.000.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				30.000.000	
	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				40.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				40.000.000	
	Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	40.000.000	Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	40.000.000	
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1				Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1		
	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				30.000.000	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				30.000.000	
	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	
	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				10.000.000	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan				10.000.000	
	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1	10.000.000	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1	10.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.069.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.069.000.000	
	Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak		Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	1.069.000.000	Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak		Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	1.069.000.000	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1				Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1		
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1				Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1		
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				75.000.000	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				75.000.000	
	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Pessel	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	75.000.000	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Pessel	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	75.000.000	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				30.000.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				30.000.000	
	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1	30.000.000	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1	30.000.000	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				964.000.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				964.000.000	
	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Kab. Pessel	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	964.000.000	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Kab. Pessel	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	964.000.000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				696.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				696.000.000	
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	696.000.000	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	696.000.000	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000		
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.000.000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.000.000	
	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pessel	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10	100.000.000	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pessel	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10	100.000.000	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				396.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				396.000.000	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Pessel	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	396.000.000	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Pessel	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	396.000.000	
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				200.000.000	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				200.000.000	
	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Pessel	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000	200.000.000	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab. Pessel	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000	200.000.000	
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				12.700.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				12.700.000.000	
	Peningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746,1	12.700.000.000	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	22.746,1	12.700.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1				Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1		
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500				Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500		
			Indeks Pertanaman (Angka)	1,85				Indeks Pertanaman (Angka)	1,85		
	Pengembangan Prasarana Pertanian				2.120.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian				2.120.000.000	
	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	2.120.000.000	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	2.120.000.000	
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	22.832				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	22.832		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				120.000.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	120.000.000	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	120.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				50.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				50.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Kab. Pessel	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	22.832	50.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Kab. Pessel	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	22.832	50.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				450.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				450.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	450.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	450.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				100.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				100.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	100.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	100.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				200.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				200.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				200.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				200.000.000	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				50.000.000	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				50.000.000	
	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1	50.000.000	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1	50.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota				200.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota				200.000.000	
	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	200.000.000	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	200.000.000	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota				300.000.000	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota				300.000.000	
	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Kab. Pessel	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	300.000.000	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Kab. Pessel	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	300.000.000	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				50.000.000	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				50.000.000	
	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	50.000.000	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	50.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				10.450.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian				10.450.000.000	
	Terbangunnya prasarana pertanian		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	10.450.000.000	Terbangunnya prasarana pertanian		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	10.450.000.000	
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1				Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				400.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				400.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.000.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kab. Pessel	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	1.000.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Kab. Pessel	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	1.000.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				400.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				400.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Kab. Pessel	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Kab. Pessel	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				50.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				50.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Kab. Pessel	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	50.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Kab. Pessel	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	50.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				200.000.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Pessel	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	200.000.000	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Pessel	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				2.000.000.000	
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Kab. Pessel	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	2.000.000.000	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Kab. Pessel	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	2.000.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				200.000.000	
	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	200.000.000	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	200.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				200.000.000	
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Kab. Pessel	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	200.000.000	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Kab. Pessel	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	200.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				6.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				6.000.000.000	
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Kab. Pessel	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	6.000.000.000	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Kab. Pessel	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	6.000.000.000	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				130.000.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				130.000.000	
	Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	130.000.000	Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	130.000.000	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1				Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1		
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				100.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				100.000.000	
	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	100.000.000	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	100.000.000	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				30.000.000	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				30.000.000	
	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1	30.000.000	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1	30.000.000	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.247.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.247.000.000	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	1.247.000.000	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100	1.247.000.000	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100		
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69		
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				462.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				462.000.000	
	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat		Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	462.000.000	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat		Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	462.000.000	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15				Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1		
			Jumlah kader zoonosis	42				Jumlah kader zoonosis	42		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				45.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				45.000.000	
	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Pessel	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	45.000.000	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Pessel	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	45.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				42.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				42.000.000	
	Terbentuknya kader zoonosis	Kab.	Jumlah kader zoonosis	42	42.000.000	Terbentuknya kader zoonosis	Kab.	Jumlah kader zoonosis	42	42.000.000	
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				45.000.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				45.000.000	
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Kab. Pessel	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15	45.000.000	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Kab. Pessel	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15	45.000.000	
	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				30.000.000	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				30.000.000	
	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Pessel	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	30.000.000	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Pessel	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	30.000.000	
	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				50.000.000	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				50.000.000	
	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Kab. Pessel	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	50.000.000	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Kab. Pessel	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	50.000.000	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Pessel	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	250.000.000	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Pessel	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	250.000.000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah				120.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah				120.000.000	
	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	120.000.000	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	120.000.000	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1				Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1		
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				30.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				30.000.000	
	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	30.000.000	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	30.000.000	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				30.000.000	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				30.000.000	
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Kab. Pessel	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	30.000.000	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Kab. Pessel	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	30.000.000	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				30.000.000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				30.000.000	
	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1	30.000.000	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kab. Pessel	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1	30.000.000	
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				30.000.000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				30.000.000	
	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Pessel	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1	30.000.000	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Pessel	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1	30.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota				350.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota				350.000.000	
	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	350.000.000	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	350.000.000	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				175.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				175.000.000	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Pessel	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	175.000.000	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Pessel	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	175.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				175.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				175.000.000	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	175.000.000	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				315.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				315.000.000	
	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	315.000.000	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	315.000.000	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2				Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2		
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1				Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1		
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5		
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				75.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				75.000.000	
	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	75.000.000	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	75.000.000	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				75.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				75.000.000	
	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	75.000.000	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Pessel	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	75.000.000	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				15.000.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				15.000.000	
	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5	15.000.000	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5	15.000.000	
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				20.000.000	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				20.000.000	
	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Kab. Pessel	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50	20.000.000	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Kab. Pessel	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50	20.000.000	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				30.000.000	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				30.000.000	
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Kab. Pessel	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	30.000.000	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Kab. Pessel	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	30.000.000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				75.000.000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				75.000.000	
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100	75.000.000	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100	75.000.000	
	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				10.000.000	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				10.000.000	
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kab. Pessel	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1	10.000.000	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kab. Pessel	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1	10.000.000	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				15.000.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				15.000.000	
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30	15.000.000	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30	15.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				267.693.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				267.693.000	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	267.693.000	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	267.693.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				267.693.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				267.693.000	
	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	267.693.000	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	267.693.000	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				153.193.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				153.193.000	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000	153.193.000	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000	153.193.000	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50	50.000.000	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50	50.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				64.500.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				64.500.000	
	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	64.500.000	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Pessel	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	64.500.000	
VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				97.750.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				97.750.000	
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	97.750.000	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	97.750.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				49.250.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				49.250.000	
	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian		Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	49.250.000	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian		Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	49.250.000	
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2				Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141		
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				5.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				5.000.000	
	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Pessel	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2	5.000.000	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Pessel	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2	5.000.000	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				11.250.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				11.250.000	
	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9	11.250.000	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Pessel	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9	11.250.000	
	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak				3.000.000	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak				3.000.000	
	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	3.000.000	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	3.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				30.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				30.000.000	
	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kab. Pessel	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	30.000.000	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Kab. Pessel	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	30.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Polong Hewan				36.000.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Polong Hewan				36.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
	Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	36.000.000	Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	36.000.000	
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30				Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30		
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10				Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10		
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-				Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-		
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	10				Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	10		
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				7.500.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				7.500.000	
	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	7.500.000	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	7.500.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				7.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				7.500.000	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10	7.500.000	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10	7.500.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				13.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan				13.500.000	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30	13.500.000	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30	13.500.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan				-	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan				7.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan				7.500.000	
	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Kab. Pessel	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	10	7.500.000	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Kab. Pessel	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	10	7.500.000	
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				12.500.000	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				12.500.000	
	Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	12.500.000	Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	12.500.000	
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2				Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				5.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				5.000.000	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2	5.000.000	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2	5.000.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				7.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				7.500.000	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	7.500.000	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Pessel	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	7.500.000	
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.221.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.221.000.000	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20,78	4.221.000.000	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20,78	4.221.000.000	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80		
			Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100				Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				4.221.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				4.221.000.000	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	4.221.000.000	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	4.221.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(22)
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15				Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				1.091.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				1.091.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	1.091.000.000	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	1.091.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.675.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.675.000.000	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459	1.675.000.000	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459	1.675.000.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				318.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				318.000.000	
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78	318.000.000	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78	318.000.000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				550.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				550.000.000	
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11	550.000.000	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11	550.000.000	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				152.000.000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				152.000.000	
	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Kab. Pessel	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50	152.000.000	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Kab. Pessel	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50	152.000.000	
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				375.000.000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				375.000.000	
	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Kab. Pessel	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15	375.000.000	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Kab. Pessel	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15	375.000.000	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				30.000.000	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				30.000.000	
	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5	30.000.000	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Kab. Pessel	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5	30.000.000	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				30.000.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				30.000.000	
	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Kab. Pessel	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	30.000.000	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Kab. Pessel	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	30.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian yang terangkum dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini juga menampung usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui Proposal kegiatan. Usulan yang disampaikan oleh masyarakat relevan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan termasuk prioritas program dan kegiatan yang direncanakan. Namun usulan dari masyarakat masih banyak yang kurang lengkap informasi mengenai volume/besaran, usulan biaya, sasaran lokasi sehingga memerlukan tahapan verifikasi langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9 (T-C.32):

Tabel 2.9 (T-C.32)
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5	
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5	
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	
		Kec. Lunang	Pengadaan Bibit Durian (Batang)	1500	Hasil Musrenbang
		Kec. Lunang	Pengadaan Bibit Manggis (Batang)	1500	Hasil Musrenbang
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Bibit Durian (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Bibit Kelapa (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Bibit Pala (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Bibit Padi (Paket)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Bibit Jagung (Paket)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
		Kec. Ranah Pesisir	Pengadaan Saprodi Cabe Merah (Paket)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
		Kec. IV. Jurai	Pengadaan Bibit Durian (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Sutera	Pengadaan Bibit Padi (Paket)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah				
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	
		Kec. Bayang Utara	Pengadaan Sapi Simental (Ekor)	25	Hasil Musrenbang
		Kec. Bayang	Pengadaan Itik (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Basaba Tapan	Pengadaan Sapi (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Silaut	Pengadaan Sapi (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Lengayang	Pengadaan Sapi (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Lengayang	Pengadaan Ayam (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Linggo Sari Baganti	Pengadaan Sapi (Paket)	1	Hasil Musrenbang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha) Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar) Indeks Pertanaman (Angka)	22.746,1 22.746,1 500 1,85	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	
	Terbangunnya prasarana pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	
		Kec. Batang Kapas	Pembangunan JUT (Unit)	1	Hasil Musrenbang
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	
		Kec. Silaut	Pembangunan Rumah Susu (Unit)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	
		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Pembangunan Irigasi Tersier (Unit)	1	Hasil Musrenbang
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	
		Kec. Basaba Tapan	Pembangunan Puskesmas (Unit)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
		Kec. Basaba Tapan	Pembangunan Puskesmas (Unit)	1	Hasil Musrenbang (diusulkan melalui APBN)
III	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20,78	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	
			Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kec. Lengayang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) Peningkatan Kapasitas Poktan (Paket)	1.459 1	Hasil Musrenbang
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11	
		Kec. IV. Jurai	MTOT Padi Sawah (paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Ranah Pesisir	SL GAP Melon (Paket)	1	Hasil Musrenbang
		Kec. Sutera	SL GHP Gambir (Paket)	1	Hasil Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2030 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita yaitu:

Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

Asta Cita 4 Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan

Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 3.1 dibawah ini dapat dilihat keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2025-2029.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Tranformasi digital	Tranformasi ekonomi
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	
		Penerapan ekonomi hijau	

	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
		Stabilitas ekonomi makro	
		Ketangguhan diplomasi dan pertahanan budaya gentar kawasan	
		Lingkungan hidup berkualitas	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	
	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Transformasi digital	Transformasi ekonomi
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	
		Integrasi ekonomi domestik dan global	
	4. Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Kesehatan untuk semua	Transformasi ekonomi
		Pendidikan berkualitas yang merata	
		Perlindungan sosial yang adaptif	Transformasi sosial
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	
	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	Transformasi ekonomi
		Integrasi ekonomi domestik dan global	
	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Perlindungan sosial yang adaptif	Transformasi sosial
		Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Transformasi ekonomi
		Transformasi digital	
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	Transformasi tata kelola
		Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	
		Hukum berkeadilan, keamanan	Supremasi hukum,

	penyeludupan; dan	nasional tangguh, dan demokrasi substansial	stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
		Stabilitas ekonomi makro	
	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Lingkungan hidup berkualitas	
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah maka visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yakni:

“Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pertanian Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	a. Meningkatkan kesejahteraan petani b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia	a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia	a. Meningkatnya pendapatan petani b. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan c. Meningkatnya cadangan pangan nasional d. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian e. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan f. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian g. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2025-2029, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rendahnya tingkat pendapatan petani	Jam kerja petani belum optimal	Optimalisasi jam kerja petani
2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat	a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan

		e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak j. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak k. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman l. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian m. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan n. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani o. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian	e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul k. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak l. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal m. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian n. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani o. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang p. Rendahnya kapasitas petugas dan petani q. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	- baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan j. Ketersediaan sumber daya pertanian k. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian l. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura m. Sinergisitas antar perangkat daerah n. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat o. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
3	Meningkatnya cadangan pangan nasional	a. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan c. Terbatasnya sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian d. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat e. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida f. Belum optimalnya produksi pertanian g. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) h. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak i. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak	a. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil b. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif c. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal d. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Biaya produksi usaha tani masih tinggi h. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim i. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian j. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul k. Tidak tersedianya lahan hijauan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal c. Berkembangnya teknologi pertanian d. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) e. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian f. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan g. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam h. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi i. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan j. Ketersediaan sumber daya

		j. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak k. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman l. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian m. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan n. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani o. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian	- pakan ternak l. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal m. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian n. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani o. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang p. Rendahnya kapasitas petugas dan petani q. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	- pertanian k. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian l. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura m. Sinergisitas antar perangkat daerah n. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat o. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
4	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	a. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran b. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian e. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Standar kualitas produk pertanian belum memadai	a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian b. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
6	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak	a. Degradasi sumber daya lahan dan air b. Kurangnya penerapan teknologi pertanian c. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Berkembangnya teknologi pertanian c. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
7	Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan	a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan	a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis	a. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan

		hewan	d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	
--	--	-------	--	--

3.1.2 Kebijakan Provinsi

Visi pembangunan provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”

Visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2029 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2025-2029, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Wakil (WKDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari 8 (delapan) misi sebagai berikut:

Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;

- Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
- Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan;
- Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;
- Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana;
- Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas;
- Misi 7. ingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM; dan
- Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

a) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing”***. Sasaran yaitu ***“Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan”***

Strategi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas produksi berbasis kawasan. Fokus pada pengembangan kawasan tanaman pangan, melalui penetapan kawasan komoditi, penguatan korporasi petani, dan integrasi sistem budidaya.

- Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur pendukung. Meliputi penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat, pupuk berimbang, alat mesin pertanian (alsintan), jalan usaha tani, dan irigasi tersier.
- Modernisasi pertanian dan penguatan SDM petani. Melalui pemberdayaan petani milenial, pelatihan budidaya ramah lingkungan, adopsi teknologi digital, dan penguatan Balai Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan yang tersebar di Kabupaten/Kota
- Pengembangan kemitraan dan kelembagaan agribisnis. Fasilitasi MoU antara kelompok tani dengan pelaku industri, pelatihan manajemen agribisnis, dan penguatan koperasi tani sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagainya.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian e. Rendahnya penggunaan benih berkualitas dan	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan

		bersertifikat f. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida g. Belum optimalnya produksi pertanian h. Terjadinya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) i. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman j. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha komoditas pertanian k. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan l. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani m. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan pertanian n. Standar kualitas produk pertanian belum memadai o. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	yang populer saja f. Degradasi sumber daya lahan dan air g. Kurangnya penerapan teknologi pertanian h. Biaya produksi usaha tani masih tinggi i. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim j. Kurangnya ketersediaan sarana pengendalian k. Minimnya kegiatan identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal l. Minimnya pengetahuan petani terhadap potensi pengembangan komoditas pertanian m. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani n. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang o. Rendahnya kapasitas petugas dan petani p. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian q. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak r. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran s. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan h. Ketersediaan fasilitas Brigade Tanam i. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsid j. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan k. Ketersediaan sumber daya pertanian l. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian m. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura n. Sinergisitas antar perangkat daerah o. Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman yang cukup besar p. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek q. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian r. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
--	--	--	--	--

b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan berbasis kelanjutan”***. Sasaran yaitu :

- Meningkatkan produksi komoditas peternakan; dan
- Meningkatkan perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Strategi yang diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan melalui peningkatan kualitas bibit, peningkatan kualitas pakan, pemanfaatan teknologi reproduksi, peningkatan nilai tambah produk peternakan dan peningkatan SDM peternakan;
- Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan strategis dan zoonosis melalui sistem deteksi dini, vaksinasi massal, dan biosekuriti lintas wilayah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera
Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi komoditas peternakan	a. Rendahnya tingkat pendapatan petani b. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Pertanian d. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak e. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak g. Belum optimalnya pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan	a. Jam kerja petani belum optimal b. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil c. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Degradasi sumber daya lahan dan air f. Kurangnya penerapan teknologi pertanian g. Minimnya ketersediaan benih ternak unggul h. Tidak tersedianya lahan hijauan pakan ternak i. Minimnya kegiatan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Optimalisasi jam kerja petani c. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal d. Berkembangnya teknologi pertanian e. Tersedianya lembaga keuangan (Perbankan) f. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian g. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas peternakan h. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas

		h. Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan i. Terbatasnya kualitas SDM petugas dan petani Serta kapasitas kelembagaan petani j. Standar kualitas produk pertanian belum memadai k. Persaingan pasar dan ketidakstabilan harga produk pertanian	- identifikasi kekayaan sumber daya alam lokal j. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan petani k. Jumlah SDM petugas di lapangan masih kurang l. Rendahnya kapasitas petugas dan petani m. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran n. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	- Peternakan i. Ketersediaan sumber daya pertanian j. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian k. Sinergisitas antar perangkat daerah l. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat m. Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang cukup besar n. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek o. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
2.	Meningkatnya perlindungan hewan dan ternak dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	a. Belum optimalnya penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis b. Masih kurangnya perlindungan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat veteriner c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan menular strategis dan zoonosis b. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap sektor pertanian yang cukup besar b. Pelayanan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan d. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Pertanian tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan Dinas Pertanian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Berdaya Saing Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

b) Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah; dan
- Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian.

Secara umum dapat dilihat sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tabel 3.6 di bawah ini;

Tabel 3.6
Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KET (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN												
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	0	100	100	100	100	100	100		
			Nilai AKIP perangkat daerah (Angka)	89.50	90.43	90.88	91.34	91.79	92.25			
			Nilai Kematangan Inovasi perangkat daerah (Angka)	90	92	93	94	95	96			
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK (Rp)	3.050.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885			

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, serta dalam rangka mengkomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kerja perangkat daerah, serta dengan menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025 – 2029.

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan meliputi :

1. Pencapaian misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 pada butir ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”** dan butir ke 3 (tiga) yaitu **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Kebijakan umum pada strategi tersebut adalah peningkatan produksi pertanian dengan program prioritas :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan

- Program Penyuluhan Pertanian.
- 2. Pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program pada perubahan Renja tahun 2025 ini adalah sebanyak 6 (enam) program yang terdiri atas 5 (lima) program pembangunan dan 1 (satu) program pendukung. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar dan terfokus. Lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dalam arti bahwa upaya yang dilakukan dalam pembangunan pertanian merata keseluruh Kabupaten Pesisir Selatan, dan yang terfokus adalah penempatan kegiatan berdasarkan peta kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian yang telah ditetapkan. Uraian program dan kegiatan rutin, pembangunan dan penunjang sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- E. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

- Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
- B. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
 - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
- C. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- D. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur
- Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
- E. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan

- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
- F. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- A. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

B. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
- C. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - Sub Kegiatan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
 - Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM
 - Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
- C. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- D. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
- Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
- Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- ### **A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - Sub Kegiatan Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
- B. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan

- Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan
- C. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Kebutuhan dana/pagu indikatif sesuai dengan sumber pendanaannya dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.44.673.250.695 yang dipergunakan untuk program pembangunan sebesar Rp.24.995.735.000 dan untuk program pendukung sebesar Rp.19.677.515.695.

3.3.3 Penjelasan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam penyusunan Renja tahun 2026 ini, penyusun target kinerja dan anggaran sesuai dengan rancangan awal perubahan RKPD, arahan dari Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan jika ada program/kegiatan yang tidak sesuai target kinerja dan anggarannya dengan rancangan awal RKPD dapat menyesuaikan dengan target kinerja dan mengurangi jumlah anggaran pada masing masing program sesuai dengan plafonisasi. Program dan kegiatan yang tidak terakomodir di APBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat diajukan anggaran ke APBD Propinsi dan APBN.

3.3.4 Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Bagian (perumusan program dan kegiatan)

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.7 (Tabel TC.33) sebagai berikut:

Tabel 3.7 (TC.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		DINAS PERTANIAN									
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			44.673.250.695				40.786.684.000		
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.677.515.695				20.666.106.000		
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,5	19.677.515.695			0,5	20.666.106.000	Dinas Pertanian	
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	91				91			
			Jumlah Inovasi (Inovasi)	7				7			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			76.000.000				83.600.000		
		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	76.000.000			4	83.600.000		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19				19			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6				6			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1				1			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1				1			
	3.27.01.2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.000.000				16.500.000		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6	16.500.000		
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.000.000				7.700.000		
		Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.700.000		
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			7.000.000				7.700.000		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.700.000		
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000				5.500.000		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	4	5.500.000		
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000				22.000.000		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19	20.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	19	22.000.000		
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			10.000.000				11.000.000		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	10.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	11.000.000		
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000.000				7.700.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	7.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	7.700.000		
	3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			5.000.000				5.500.000		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.500.000		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.145.165.695				16.952.633.000		
		Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	16.145.165.695			1	16.952.633.000		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13				13			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146				146			
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.016.405.695				16.817.225.000		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	146	16.016.405.695	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	146	16.817.225.000		
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			124.560.000				130.788.000		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	124.560.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	130.788.000		
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.200.000				4.620.000		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	4.200.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	13	4.620.000		
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000				61.000.000		
		Terlindungnya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	60.000.000			1	61.000.000		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1				1			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1				1			
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			50.000.000				50.000.000		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000				5.500.000		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.500.000		
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000				5.500.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.500.000		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44.600.000				49.060.000		
		Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	146	44.600.000			146	49.060.000		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5				5			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1				1			
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			5.000.000				5.500.000		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	5.500.000		
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.000.000				27.500.000		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	25.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	27.500.000		
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			14.600.000				16.060.000		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	146	14.600.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	146	16.060.000		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			451.400.000				482.040.000		
		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	451.400.000			1	482.040.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3				3			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12				12			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				1			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1				1			
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.000.000				12.100.000		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	12.100.000		
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			145.000.000				145.000.000		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	145.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	145.000.000		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000.000				16.500.000		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	16.500.000		
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.400.000				5.940.000		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	3	5.940.000		
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000				16.500.000		
		Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	12	16.500.000		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000.000				275.000.000		
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	250.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	275.000.000		
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.000.000				11.000.000		
		Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	11.000.000		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350.465.000				314.109.000		
		Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	350.465.000			2	314.109.000		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37				37			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10				10			
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000				52.500.000		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	52.500.000		
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			146.972.000				154.320.000		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37	146.972.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	37	154.320.000		
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			153.493.000				107.289.000		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	153.493.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	107.289.000		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.821.270.000				1.836.276.000		
		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.821.270.000			1	1.836.276.000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1				1			
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			151.270.000				159.026.000		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	151.270.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	159.026.000		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.670.000.000				1.677.250.000		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.670.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	1.677.250.000		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			728.615.000				887.388.000		
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	728.615.000			2	887.388.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	210				210			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1				1			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112				112			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2				2			
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.915.000				41.173.000		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	40.915.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	41.173.000		
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			574.800.000				578.520.000		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	210	574.800.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	210	578.520.000		
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.900.000				37.695.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	112	35.900.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	112	37.695.000		
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			62.000.000				200.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	62.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	200.000.000		
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000				30.000.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	30.000.000		
	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			6.462.292.000				7.058.090.000		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2	6.462.292.000			2	7.058.090.000	Dinas Pertanian	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,5				0,5			
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,1				3,1			
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	1,5				1,5			
			Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (Kw/ha)	59,22				59,22			
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			4.477.292.000				4.925.020.000		
		Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	4.477.292.000			1	4.925.020.000		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	1				1			
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000				6.000			
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000				6.000			
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30				30			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2				2			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	5				5			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1				1			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	1				1			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1				1			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	1				1			
3.27.02.2.01.0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2.812.462.000				3.093.708.000		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	1	2.812.462.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	3.093.708.000		
3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			78.000.000				85.800.000		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	2	78.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	85.800.000		
3.27.02.2.01.0003		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			100.000.000				110.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	30	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	110.000.000		
3.27.02.2.01.0005		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			200.000.000				220.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
3.27.02.2.01.0006		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan			287.665.000				316.431.000		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	1	287.665.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	316.431.000		
3.27.02.2.01.0007		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			200.000.000				220.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
3.27.02.2.01.0008		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			100.000.000				110.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	6.000	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6.000	110.000.000		
3.27.02.2.01.0009		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			60.000.000				66.000.000		
		Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	6.000	60.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	6.000	66.000.000		
3.27.02.2.01.0012		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan			200.000.000				220.000.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
3.27.02.2.01.0014		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			404.165.000				444.581.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	1	404.165.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	444.581.000		
3.27.02.2.01.0016		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura			35.000.000				38.500.000		
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (laporan)	5	35.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	38.500.000		
3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			150.000.000				165.000.000		
		Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	150.000.000			1	165.000.000		
				2				2			
3.27.02.2.02.0004		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			100.000.000				110.000.000		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	110.000.000		
3.27.02.2.02.0005		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			50.000.000				55.000.000		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	55.000.000		
3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah			30.000.000				31.500.000		
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (laporan)	1	30.000.000			1	31.500.000		
3.27.02.2.03.0002		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			30.000.000				31.500.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			40.000.000				42.000.000		
		Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	40.000.000			1	42.000.000		
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1				1			
	3.27.02.2.04.0001	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			30.000.000				31.500.000		
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan			10.000.000				10.500.000		
		Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	1	10.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	10.500.000		
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.069.000.000				1.170.650.000		
		Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	1.069.000.000			10.000	1.170.650.000		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1				1			
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1				1			
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			75.000.000				78.750.000		
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10.000	75.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10.000	78.750.000		
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			30.000.000				31.500.000		
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			964.000.000				1.060.400.000		
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	964.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	1.060.400.000		
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			696.000.000				723.920.000		
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	696.000.000			15	723.920.000		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10				10			
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000				10.000			
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			100.000.000				110.000.000		
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	110.000.000		
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			396.000.000				403.920.000		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	15	396.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	403.920.000		
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			200.000.000				210.000.000		
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	10.000	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10.000	210.000.000		
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			12.700.000.000				7.218.500.000		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan	22.746,1	12.700.000.000			22.746,1	7.218.500.000	Dinas Pertanian	
			Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1				22.746,1			
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	500				500			
			Indeks Pertanaman (Angka)	1,85				1,85			
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			2.120.000.000				1.922.000.000		
		Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	2.120.000.000			1	1.922.000.000		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikelola dan dimanfaatkan (Unit)	1				1			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2				2			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				1			
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				1			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				1			
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1				1			
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1				1			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1				1			
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1				1			
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1				1			
			Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	22.832				22.832			
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			120.000.000				132.000.000		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Agoran)	1	120.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	132.000.000		
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			50.000.000				55.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	22.832	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	22.832	55.000.000		
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			450.000.000				495.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	450.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	495.000.000		
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan			100.000.000				110.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	110.000.000		
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan			200.000.000				220.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			200.000.000				220.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			200.000.000				220.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			200.000.000				220.000.000		
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	220.000.000		
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota			50.000.000				-		
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	1	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	0	-		
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota			200.000.000				200.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota			300.000.000				-		
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	300.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	0	-		
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			50.000.000				50.000.000		
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	50.000.000		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			10.450.000.000				5.155.000.000		
		Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	10.450.000.000			1	5.155.000.000		
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1				1			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-				-			
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5				5			
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1				1			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20				20			
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2				2			
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2				2			
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1				1			
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10				10			
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			400.000.000				400.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	400.000.000		
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1.000.000.000				1.000.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	1.000.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	1.000.000.000		
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			400.000.000				400.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	400.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	400.000.000		
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			50.000.000				55.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	55.000.000		
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			200.000.000				200.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			0				500.000.000		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	-	0	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	-	500.000.000		
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.000.000.000				2.000.000.000		
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	2.000.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	20	2.000.000.000		
	3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			200.000.000				200.000.000		
		Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas			200.000.000				200.000.000		
		Terbangun, terpeliharaan, terpeliharaan dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	200.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			6.000.000.000				200.000.000		
		Terbangun, terpeliharaan, terpeliharaan dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	6.000.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	200.000.000		
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			130.000.000				141.500.000		
		Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	130.000.000			1	141.500.000		
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1				1			
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			100.000.000				110.000.000		
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	1	100.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	110.000.000		
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			30.000.000				31.500.000		
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.247.000.000				1.344.200.000		
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	1.247.000.000			100	1.344.200.000	Dinas Pertanian	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100				100			
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3,69				3,69			
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	28,57				28,57			
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah			462.000.000				504.200.000		
		Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	462.000.000			1	504.200.000		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15				15			
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15				15			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1				1			
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1				1			
			Jumlah kader zoonosis (Orang)	42				42			
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			45.000.000				49.500.000		
		Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15	45.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	49.500.000		
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis			42.000.000				46.200.000		
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	42	42.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	42	46.200.000		
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			45.000.000				49.500.000		
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15	45.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	49.500.000		
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			30.000.000				31.500.000		
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis			50.000.000				52.500.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	1	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	52.500.000		
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000				275.000.000		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	250.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	275.000.000		
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah			120.000.000				126.000.000		
		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1	120.000.000			1	126.000.000		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1				1			
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1				1			
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1				1			
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			30.000.000				31.500.000		
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			30.000.000				31.500.000		
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			30.000.000				31.500.000		
		Terawasi dan terperriksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya			30.000.000				31.500.000		
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	31.500.000		
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota			350.000.000				367.500.000		
		Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	350.000.000			1	367.500.000		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1				1			
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			175.000.000				183.750.000		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	1	175.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	183.750.000		
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			175.000.000				183.750.000		
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	175.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	183.750.000		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			315.000.000				346.500.000		
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	315.000.000			1	346.500.000		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100				100			
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1				1			
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2				2			
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1				1			
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50				50			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30				30			
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5				5			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			75.000.000				82.500.000		
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	75.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	82.500.000		
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			75.000.000				82.500.000		
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	75.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	82.500.000		
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			15.000.000				16.500.000		
		Terbinanya unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	5	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	16.500.000		
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit			20.000.000				22.000.000		
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	50	20.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	22.000.000		
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan			30.000.000				33.000.000		
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	33.000.000		
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan			75.000.000				82.500.000		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	100	75.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	100	82.500.000		
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan			10.000.000				11.000.000		
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	1	10.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	11.000.000		
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			15.000.000				16.500.000		
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	30	15.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	16.500.000		
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			267.693.000				294.463.000		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	267.693.000			100	294.463.000	Dinas Pertanian	
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100				100			
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			267.693.000				294.463.000		
		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	267.693.000			1	294.463.000		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50				50			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000				5.000			
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			153.193.000				171.013.000		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5.000	153.193.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5.000	171.013.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			50.000.000				52.500.000		
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	50	50.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	52.500.000		
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			64.500.000				70.950.000		
		Tertanganinya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	64.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	70.950.000		
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			97.750.000				112.525.000		
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	97.750.000			100	112.525.000	Dinas Pertanian	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			49.250.000				54.175.000		
		Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	49.250.000			1	54.175.000		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2				2			
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9				9			
			Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141				141			
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			5.000.000				5.500.000		
		Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	2	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	5.500.000		
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			11.250.000				12.375.000		
		Tertaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	9	11.250.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	9	12.375.000		
	3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak			3.000.000				3.300.000		
		terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	1	3.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	3.300.000		
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			30.000.000				33.000.000		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	141	33.000.000		
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			36.000.000				44.600.000		
		Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	36.000.000			5	44.600.000		
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30				30			
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10				10			
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	0				0			
			Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	10				10			
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			7.500.000				8.250.000		
		Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	5	7.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	8.250.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan			7.500.000				8.250.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	10	7.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	8.250.000		
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan			13.500.000				14.850.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	30	13.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	30	14.850.000		
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan			0				5.000.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	-	0	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	-	5.000.000		
	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau Pasar Hewan			7.500.000				8.250.000		
		Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner atau	10	7.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	10	8.250.000		
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			12.500.000				13.750.000		
		Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	12.500.000			15	13.750.000		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2				2			
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			5.000.000				5.500.000		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	2	5.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	2	5.500.000		
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			7.500.000				8.250.000		
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	15	7.500.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	8.250.000		
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			4.221.000.000				4.092.800.000		
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20,78	4.221.000.000			20,78	4.092.800.000	Dinas Pertanian	
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80				80			
			Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100				100			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.221.000.000				4.092.800.000		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan	1	4.221.000.000			1	4.092.800.000		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5				5			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11				11			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78				78			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50				50			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459				1.459			
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15				15			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15				15			
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.091.000.000				1.200.100.000		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	1.091.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	1.200.100.000		
	3.27.07.2.01.0001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.675.000.000				1.457.500.000		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.459	1.675.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1.459	1.457.500.000		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			318.000.000				214.500.000		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	78	318.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	78	214.500.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			550.000.000				605.000.000		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	11	550.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	11	605.000.000		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			152.000.000				167.200.000		
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50	152.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	50	167.200.000		
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota			375.000.000				382.500.000		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	15	375.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	15	382.500.000		
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			30.000.000				33.000.000		
		Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	5	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	5	33.000.000		
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			30.000.000				33.000.000		
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didiseminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	30.000.000	Kabupaten Pesisir Selatan	Dana Alokasi Umum	1	33.000.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Renja Tahun 2026

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Renja ini disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Renja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 Pendanaan Perangkat daerah, Sumber Dana/Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pertanian tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Tabel TC. 27) sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1	6.664.000	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000		49.399.000		
		3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					6.664.000		7.000.000				8.470.000		9.317.000		10.248.000		49.399.000		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1	6.664.000	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000		49.399.000		
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.894.950		5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.000		35.419.950		
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4	4.894.950	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.050.000	4	6.655.000	4	7.320.000		35.419.950		
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					336.027.500		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		458.129.500		
			Teraksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19		19	336.027.500	19	20.000.000	19	22.000.000	19	24.200.000	19	26.620.000	19	29.282.000		458.129.500		
		3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					-		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		61.051.000		
			Teraksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		0	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		61.051.000		
		3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					-		7.000.000		7.700.000		8.470.000		9.317.000		10.248.000		42.735.000		
			Teraksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		0	-	1	7.000.000	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.000		42.735.000		
		3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					-		5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.000		30.525.000		
			Terusumnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0		0	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.000		30.525.000		
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.379.823.945		16.145.165.695		16.952.633.000		17.800.496.000		18.690.774.000		19.625.593.000		105.594.485.640		
			Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1	16.379.823.945	1	16.145.165.695	1	16.952.633.000	1	17.800.496.000	1	18.690.774.000	1	19.625.593.000		105.594.485.640		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13		13		13		13		13		13		13					
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178		146		146		144		140		131		127					
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.017.029.695		16.016.405.695		16.817.225.000		17.658.087.000		18.540.991.000		19.468.041.000		104.517.779.390		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178		146	16.017.029.695	146	16.016.405.695	144	16.817.225.000	140	17.658.087.000	131	18.540.991.000	127	19.468.041.000		104.517.779.390		
		3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					358.676.000		124.560.000		130.788.000		137.327.000		144.193.000		151.403.000		1.046.947.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	358.676.000	1	124.560.000	1	130.788.000	1	137.327.000	1	144.193.000	1	151.403.000	1	151.403.000	1	1.046.947.000		
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13		4.118.250		4.200.000		4.620.000		5.082.000		5.590.000		6.149.000		6.149.000		29.759.250		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	4.118.250	13	4.200.000	13	4.620.000	13	5.082.000	13	5.590.000	13	6.149.000	13	6.149.000		29.759.250		
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	24.865.225	1	60.000.000		61.000.000		62.100.000		63.310.000		64.641.000		64.641.000		335.916.225		
			Terindunginya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	24.865.225	1	60.000.000	1	61.000.000	1	62.100.000	1	63.310.000	1	64.641.000	1	64.641.000		335.916.225		
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1							
		3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	24.865.225	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		274.865.225		
			Teraksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	24.865.225	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		274.865.225		
		3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		7.320.500		30.525.500		
			Teraksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	7.320.500		30.525.500		
		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		7.320.500		30.525.500		
			Teraksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	7.320.500		30.525.500		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0	0	8.047.862	146	44.600.000		49.080.000		53.986.000		59.382.000		65.297.000		65.297.000		280.332.862		
			Terungkapnya data kepegawalan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0	0	8.047.862	144	44.600.000	144	49.080.000	140	53.986.000	131	59.382.000	127	65.297.000	127	65.297.000		280.332.862		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1		5		5		5		5		5							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1							
		3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	2.879.200	1	5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.000		7.320.000		33.404.200		
			Teraksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	2.879.200	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.000	1	7.320.000		33.404.200		
		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	5.168.662		25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.000		36.602.000		157.795.662		
			Teraksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	5.168.662	5	25.000.000	5	27.500.000	5	30.250.000	5	33.275.000	5	36.602.000	5	36.602.000		157.795.662		
		3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-		14.600.000		16.080.000		17.666.000		19.432.000		21.375.000		21.375.000		89.133.000		
			Teraksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	146	14.600.000	144	16.080.000	140	17.666.000	131	19.432.000	127	21.375.000	127	21.375.000		89.133.000		
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	120.249.772		451.400.000		482.040.000		515.744.000		552.818.000		593.599.000		593.599.000		2.715.850.772		
			Terpenuhnya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	120.249.772	1	451.400.000	1	482.040.000	1	515.744.000	1	552.818.000	1	593.599.000	1	593.599.000		2.715.850.772		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2025			2026			2027			2028			2029			2030				
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target			Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3									
				Pentaausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1									
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12									
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1									
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1									
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1									
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.663.552		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.000		72.819.552						
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	1	5.663.552	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	16.105.000		72.819.552						
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.952.680		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		759.952.680						
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1	1	34.952.680	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		759.952.680						
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.260.340		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.000		97.836.340						
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1	1	6.260.340	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.000		97.836.340						
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000		5.400.000		5.940.000		6.534.000		7.187.000		7.906.000		38.367.000						
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.940.000	3	6.534.000	3	7.187.000	3	7.906.000		38.367.000						
		3.27.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				3.300.000		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.000		94.876.000						
			Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		12	12	3.300.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	21.961.000		94.876.000						
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.355.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		1.587.630.000						
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	61.355.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000		1.587.630.000						
		3.27.01.2.06.0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.318.200		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		64.366.200						
			Tersedianya Penaausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	3.318.200	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		64.366.200						
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				28.175.000		350.465.000		314.109.000		329.815.000		346.305.000		363.621.000		1.732.490.000						
			Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		0	0	28.175.000	2	350.465.000	2	314.109.000	2	329.815.000	2	346.305.000	2	363.621.000		1.732.490.000						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0		37		37		33		33		33									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	2		8		8		8		8		8									
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.000		60.775.000		276.281.000						
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	0	-	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.000	2	60.775.000		276.281.000						
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				-		146.972.000		154.320.000		162.036.000		170.138.000		178.645.000		812.111.000						
			Tersedianya Mebel		0	0	-	37	146.972.000	37	154.320.000	33	162.036.000	33	170.138.000	33	178.645.000		812.111.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2025			2026			2027			2028			2029			2030					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.				Target	Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	28.175.000	153.493.000	8	107.289.000	112.654.000	8	107.289.000	112.654.000	8	118.286.000	124.201.000	8	124.201.000	644.098.000								
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.104.416.033	1.821.270.000	1	1.836.276.000	1.852.151.000	1	1.836.276.000	1.852.151.000	1	1.868.951.000	1.886.736.000	1	1.886.736.000	10.369.800.033								
			Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.104.416.033	1.821.270.000	1	1.836.276.000	1.852.151.000	1	1.836.276.000	1.852.151.000	1	1.868.951.000	1.886.736.000	1	1.886.736.000	10.369.800.033								
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	133.930.000	151.270.000	1	159.026.000	167.189.000	1	159.026.000	167.189.000	1	175.781.000	184.826.000	1	184.826.000	972.022.000								
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	970.486.033	1.670.000.000	1	1.677.250.000	1.684.962.000	1	1.677.250.000	1.684.962.000	1	1.693.170.000	1.701.910.000	1	1.701.910.000	9.397.778.033								
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	0	0	140.240.000	728.615.000	2	887.388.000	916.692.000	2	887.388.000	916.692.000	2	948.881.000	984.248.000	2	984.248.000	4.606.064.000								
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	210	210	140.240.000	728.615.000	210	887.388.000	916.692.000	210	887.388.000	916.692.000	210	948.881.000	984.248.000	210	984.248.000	4.606.064.000								
				Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	1	1	140.240.000	728.615.000	1	887.388.000	916.692.000	1	887.388.000	916.692.000	1	948.881.000	984.248.000	1	984.248.000	4.606.064.000								
				Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	75	112	140.240.000	728.615.000	112	887.388.000	916.692.000	112	887.388.000	916.692.000	112	948.881.000	984.248.000	112	984.248.000	4.606.064.000								
				Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	0	0	140.240.000	728.615.000	2	887.388.000	916.692.000	2	887.388.000	916.692.000	2	948.881.000	984.248.000	2	984.248.000	4.606.064.000								
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	1	1	40.690.000	40.915.000	1	41.173.000	41.471.000	1	41.173.000	41.471.000	1	41.813.000	42.207.000	1	42.207.000	248.269.000								
			Terseledanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	1	1	40.690.000	40.915.000	1	41.173.000	41.471.000	1	41.173.000	41.471.000	1	41.813.000	42.207.000	1	42.207.000	248.269.000								
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)			91.200.000	574.800.000		578.520.000	582.642.000		578.520.000	582.642.000		587.210.000	592.275.000		592.275.000	3.006.647.000								
			Terseledanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	210	210	91.200.000	574.800.000	210	578.520.000	582.642.000	210	578.520.000	582.642.000	210	587.210.000	592.275.000	210	592.275.000	3.006.647.000								
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)			8.350.000	35.900.000		37.695.000	39.579.000		37.695.000	39.579.000		41.558.000	43.636.000		43.636.000	206.718.000								
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara dan Dibiayakan (Unit)	75	112	8.350.000	35.900.000	112	37.695.000	39.579.000	112	37.695.000	39.579.000	112	41.558.000	43.636.000	112	43.636.000	206.718.000								
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	62.000.000	-	200.000.000	220.000.000	-	200.000.000	220.000.000	-	242.000.000	266.200.000	-	266.200.000	990.200.000								
			Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	62.000.000	2	200.000.000	220.000.000	2	200.000.000	220.000.000	2	242.000.000	266.200.000	2	266.200.000	990.200.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Barak dan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Barak dan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	2	15.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	154.230.000							
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Barak dan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Barak dan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	2	15.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	154.230.000							
		3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					128.110.150		6.462.292.000	7.058.090.000	7.711.897.000	8.429.453.000	9.217.074.000	39.006.916.150							
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-15,58	2	128.110.150		2	6.462.292.000	7.058.090.000	7.711.897.000	8.429.453.000	9.217.074.000	39.006.916.150							
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	13,67	0,5			0,5													
				Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	2,67	3,1			3,2													
				Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian (%)	-27,75	1,5			2													
				Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun (kg/ha)	56,92	59,22			60,4													
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					70.000.000		4.477.292.000	4.925.020.000	5.417.522.000	5.959.275.000	6.555.201.000	27.404.310.000							
			Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	70.000.000		1	4.477.292.000	4.925.020.000	5.417.522.000	5.959.275.000	6.555.201.000	27.404.310.000							
				Jumlah pengawasan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0			1													
				Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk Batang yang diperbanyak (Balok)	0	0			6.000													
				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Ber bentuk Balok (Balok)	0	0			6.000													
				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Top)	0	0			30													
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0			2													
				Jumlah pengawasan pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0			5													
				Jumlah pengawasan pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0			1													
				Jumlah pengawasan pengolahan sarana pengolah hasil tanaman pangan (Laporan)	0	0			1													
				Jumlah pengawasan pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0			1													
				Jumlah pengawasan pengolahan sarana pengolah hasil hortikultura (Laporan)	0	0			1													
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					70.000.000		2.812.462.000	3.093.708.000	3.403.079.000	3.743.387.000	4.117.726.000	17.240.362.000							
			Terawasiya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	70.000.000		1	2.812.462.000	3.093.708.000	3.403.079.000	3.743.387.000	4.117.726.000	17.240.362.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
	3.27.02.2.01.002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laboran)	1	0	-	2	78.000.000	85.800.000	85.800.000	2	94.380.000	103.818.000	114.199.000	476.197.000									
	3.27.02.2.01.003		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	-	30	100.000.000	110.000.000	110.000.000	30	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000									
	3.27.02.2.01.005		Tersedianya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laboran)	0	0	-	1	200.000.000	220.000.000	220.000.000	1	242.000.000	266.200.000	292.820.000	1.221.020.000									
	3.27.02.2.01.006		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laboran)	0	0	-	1	287.665.000	316.431.000	316.431.000	1	348.074.000	382.882.000	421.170.000	1.756.222.000									
	3.27.02.2.01.007		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laboran)	0	0	-	1	200.000.000	220.000.000	220.000.000	1	242.000.000	266.200.000	292.820.000	1.221.020.000									
	3.27.02.2.01.008		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Balok)	0	0	-	6.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	6.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	610.510.000									
	3.27.02.2.01.009		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Balok)	0	0	-	6.000	60.000.000	66.000.000	66.000.000	6.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	366.306.000									
	3.27.02.2.01.012		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laboran)	0	0	-	1	200.000.000	220.000.000	220.000.000	1	242.000.000	266.200.000	292.820.000	1.221.020.000									
	3.27.02.2.01.014		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan sarana pascapanen tanaman pangan (Laboran)	0	0	-	1	404.165.000	444.581.000	444.581.000	1	489.039.000	537.943.000	591.737.000	2.467.465.000									
	3.27.02.2.01.016		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan sarana pascapanen hortikultura (Laboran)			-		35.000.000	38.500.000	38.500.000		42.350.000	46.585.000	51.243.000	213.678.000									
			Tersedianya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan sarana pascapanen hortikultura (Laboran)	0	0	-	5	35.000.000	38.500.000	38.500.000	5	42.350.000	46.585.000	51.243.000	213.678.000									
	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keanekaragaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemuliaan (Varietas Unggul Baru (VUB))			28.110.150		150.000.000	165.000.000	165.000.000		181.500.000	199.650.000	219.615.000	943.875.150									
			Tersedia (SDG) Hewan/Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemuliaan (Varietas Unggul Baru (VUB))	0	0	28.110.150	1	150.000.000	165.000.000	165.000.000	1	181.500.000	199.650.000	219.615.000	943.875.150									
					2	2		2				2													
	3.27.02.2.02.004		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				28.110.150		100.000.000	110.000.000	110.000.000		121.000.000	133.100.000	146.410.000	638.620.150									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
			Terjaminnya kemunitan dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemunitan (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	28.110.150	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000		638.620.150							
		3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemunitan dan Kestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemunitan (laporan)	0			50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		305.255.000							
			Terjaminnya kemunitan dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemunitan (laporan)	0	0	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000		305.255.000						
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)				30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000							
			Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		165.766.000						
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)				30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000							
			Terawasanya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		165.766.000						
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Lindak Pengas	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)				40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.304.000		48.620.000		221.024.000							
			Terawasanya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0	0	-	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.100.000	1	46.304.000	1	48.620.000		221.024.000						
				Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilindak (Kasus)	0	0	-	1																	
		3.27.02.2.04.0001	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)				30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000							
			Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		165.766.000						
		3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilindak (Kasus)				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.000		12.155.000		55.256.000							
			Teraksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilindak (Kasus)	0	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000	1	12.155.000		55.256.000						
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan)				1.069.000.000		1.170.650.000		1.282.202.000		1.404.633.000		1.539.019.000		6.465.504.000							
			Terkendali dan terawasanya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan)	0	0	-	10.000	1.069.000.000	10.000	1.170.650.000	10.000	1.282.202.000	10.000	1.404.633.000	10.000	1.539.019.000		6.465.504.000						
				Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	0	0	-	1																	
				Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0	0	-	1																	
		3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan)				75.000.000		78.750.000		82.687.000		86.821.000		91.162.000		414.420.000							
			Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Laporan)	0	0	-	10.000	75.000.000	10.000	78.750.000	10.000	82.687.000	10.000	86.821.000	10.000	91.162.000		414.420.000						
		3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Terawasanya Peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)				30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000							
			Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		165.766.000						
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)				964.000.000		1.060.400.000		1.166.440.000		1.283.084.000		1.411.392.000		5.885.316.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2025			2026			2027			2028			2029					2030		
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.				Target	Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
				Terjalinnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laboran)	0	0	-	1	964.000.000	1	1.060.400.000	1	1.166.440.000	1	1.283.084.000	1	1.411.392.000		5.885.316.000					
	3.27.02.2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)				30.000.000		696.000.000		723.920.000		753.498.000		784.863.000		818.154.000		3.806.435.000					
			Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	0	30.000.000	15	696.000.000	15	723.920.000	15	753.498.000	15	784.863.000	15	818.154.000		3.806.435.000					
				Jumlah Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	0		10		10		10		10			10							
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	900	10.000	10.000		10.000		10.000							10.000							
	3.27.02.2.06.0002		Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	-		100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000					
			Tersedianya Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	0	-	10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	133.100.000	10	146.410.000		610.510.000					
	3.27.02.2.06.0003		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				-	-		396.000.000		403.920.000		411.998.000		420.238.000		428.643.000		2.060.799.000					
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	0	0	0	-	15	396.000.000	15	403.920.000	15	411.998.000	15	420.238.000	15	428.643.000		2.060.799.000					
	3.27.02.2.06.0004		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		900	1450	30.000.000	30.000.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		1.135.126.000					
			Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)				30.000.000	10.000	200.000.000	10.000	210.000.000	10.000	220.500.000	10.000	231.525.000	10.000	243.101.000		1.135.126.000					
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					970.967.800		12.700.000.000		7.218.500.000		6.903.775.000		7.107.498.000		7.331.512.000		42.232.252.800					
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	22.746,1	22.746,1	22.746,1	970.967.800	22.746,1	12.700.000.000	22.746,1	7.218.500.000	22.746,1	6.903.775.000	22.746,1	7.107.498.000	22.746,1	7.331.512.000		42.232.252.800	3.270.000.000				
				Jumlah prasarana pertanian yang terdistribusi dan terdapat di daerah Kabupaten/Kota Lain	22.746,1	22.746,1	22.746,1		22.746,1																
				Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan dilindungi (Hektar)	25	500	500		500		500				500		500								
				Indeks Pertanian (Angka)	1,7	1,85	1,85		1,85		1,93				1,95		2								
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				1	1	1	2.120.000.000	1	1.922.000.000	1	2.089.200.000	1	2.273.120.000	1	2.475.432.000		11.550.719.800					
			Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laboran)	1	1	670.967.800	670.967.800	1	2.120.000.000	1	1.922.000.000	1	2.089.200.000	1	2.273.120.000	1	2.475.432.000		11.550.719.800					
				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		1		1				1		1								
				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		2		2				2		2								
				Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		1		1				1		1								
				Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		1		1				1		1								
				Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		1		1				1		1								
				Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0		1		1				1		1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2025			2026			2027			2028			2029					2030		
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.				Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1									
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1									
				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0		1		0		0		0											
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0		1		0		0		0											
				Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	0	0	670.967.600	22.832				22.832					22.832								
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						120.000.000		132.000.000			145.200.000		159.720.000		175.692.000		1.403.579.800					
			Teraksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laboran)	1	1	670.967.600	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	175.692.000	1	1.403.579.800						
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				-		50.000.000		55.000.000			60.500.000		66.550.000		73.205.000		305.255.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	0	0	-	22.832	50.000.000	22.832	55.000.000	22.832	60.500.000	22.832	66.550.000	22.832	73.205.000	305.255.000							
		3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				-		450.000.000		495.000.000			544.500.000		598.950.000		658.845.000		2.747.295.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	2	450.000.000	2	495.000.000	2	544.500.000	2	598.950.000	2	658.845.000	2.747.295.000							
		3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perikanan				-		100.000.000		110.000.000			121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen perikanan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	610.510.000							
		3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				-		200.000.000		220.000.000			242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.221.020.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1.221.020.000							
		3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				-		200.000.000		220.000.000			242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.221.020.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1.221.020.000							
		3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				-		200.000.000		220.000.000			242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.221.020.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1.221.020.000							
		3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				-		200.000.000		220.000.000			242.000.000		266.200.000		292.820.000		1.221.020.000					
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1.221.020.000							
		3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				-		50.000.000		0		0		0		0		50.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
			Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Pendapatan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	0	-	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000						
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	-					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000						
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		1.000.000.000						
		3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-					300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000						
			Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0	0	-	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000						
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000						
			Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000						
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-			300.000.000		10.450.000.000		5.155.000.000		4.680.500.000		4.666.550.000		4.673.205.000		29.905.255.000						
			Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	300.000.000	1	10.450.000.000	1	5.155.000.000	1	4.680.500.000	1	4.666.550.000	1	4.673.205.000		29.905.255.000						
				Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		1									
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		1		0		0		0									
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		5		5		5		1		5									
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1		1									
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	2		20		20		20		20		20									
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2		2									
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2		2									
				Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0		1		1		1		1		1									
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	1		10		10		10		10		10									
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarkan dan Dimanfaatkan (Laboran)	0		0	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		610.510.000			
		3.27.03.2.03.0002	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarkan dan Dimanfaatkan (Laboran)			-			30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000			
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0		0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		165.766.000			
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			24.469.910				1.247.000.000		1.344.200.000		1.448.744.000		1.564.395.000		1.689.000.000		7.318.808.910			
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100		100	24.469.910	100	1.247.000.000	100	1.344.200.000	100	1.448.744.000	100	1.564.395.000	100	1.689.000.000		7.318.808.910	3.27.0.00.0.00.01.00000 -		
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menurut Strategis (PHMS) (%)	100		100		100								100						
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menurut (%)	2,05		3,69		3,69				3,88		4,14		4,32						
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	21,43		28,57		35,71				42,88		50		57,14						
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah					24.469.910		462.000.000		504.200.000		550.420.000		601.051.000		656.525.000		2.798.665.910			
			Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0		0	24.469.910	1	462.000.000	1	504.200.000	1	550.420.000	1	601.051.000	1	656.525.000		2.798.665.910			
				Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laboran)	15		0		15				15		15		15						
				Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0		0		15				15		15		15						
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laboran)	1		1		1				1		1		1						
				Jumlah kejadian penyakit yang dilaporkan dengan penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (kasus)	1		0		1				1		1		1						
				Jumlah kader zoonosis (Orang)	0		0		42				35		35		35						
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					-		45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.000		274.729.000			
			Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laboran)	15		0	-	15	45.000.000	15	49.500.000	15	54.450.000	15	59.895.000	15	65.884.000		274.729.000			
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis					-		42.000.000		46.200.000		50.820.000		55.902.000		61.492.000		256.414.000			
			Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0		0	-	42	42.000.000	35	46.200.000	35	50.820.000	35	55.902.000	35	61.492.000		256.414.000			
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					-		45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.000		274.729.000			
			Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0		0	-	15	45.000.000	15	49.500.000	15	54.450.000	15	59.895.000	15	65.884.000		274.729.000			
		3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyelidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					-		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		36.465.000		165.766.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Rp.		Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	1	0	-	1	30.000.000	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.000			
		3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	0	-	-	50.000.000	52.500.000	-	55.125.000	-	57.881.000	-	60.775.000	-	60.775.000		276.281.000			
			Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah					-	1	50.000.000	1	55.125.000	1	57.881.000	1	60.775.000	1	60.775.000		276.281.000			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					24.469.910		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		1.550.744.910			
			Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	24.469.910	1	250.000.000	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1	366.025.000		1.550.744.910			
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah					-	-	120.000.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000		145.860.000		663.075.000			
			Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	0	0	-	1	120.000.000	126.000.000	0	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.000	1	145.860.000		663.075.000			
			Penerapan persyaratan teknis pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Penjualan HPM (Laporan)	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Penjualan HPM (Laporan)	0	0		1			1		1	1			1						
			Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0		1			1		1	1			1						
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	0		1			1		1	1			1						
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)					-	-	30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.000		165.768.750			
			Terawasi penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pemasukan dan/atau Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pemasukan dan/atau Hewan	0	0	-	1	30.000.000	31.500.000	0	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.750			
		3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan					-	-	30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.000		165.768.750			
			Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.750			
		3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Penjualan HPM					-	-	30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.000		165.768.750			
			Terawasi dan terpeliksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Penjualan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Penjualan HPM	0	0	-	1	30.000.000	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.750			
		3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya					-	-	30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.000		165.768.750			
			Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.750			
			Terlaksananya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	0	-	1	30.000.000	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.000	1	36.465.000		165.768.750			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota					-	-	350.000.000		367.500.000		385.874.000		405.164.000		425.426.000		1.933.964.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laboran)	1	0	-	1	350.000.000	1	367.500.000	1	385.874.000	1	405.164.000	1	425.426.000		1.933.864.000		
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laboran)			-	1	175.000.000		183.750.000		192.937.000		202.580.000		212.713.000		966.880.000		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laboran)	1	0	-	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.000	1	202.580.000	1	212.713.000		966.880.000		
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laboran)			-		175.000.000		183.750.000		192.937.000		202.584.000		212.713.000		966.884.000		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laboran)	1	0	-	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.000	1	202.584.000	1	212.713.000		966.884.000		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengembangan Masyarakat Veteriner				-		315.000.000		346.500.000		381.150.000		419.265.000		461.189.000		1.923.104.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pengembangan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laboran)	1	0	-	1	315.000.000	1	346.500.000	1	381.150.000	1	419.265.000	1	461.189.000		1.923.104.000		
				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orano)	0	0		100		100						100					
				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			1				
				Jumlah Pelugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orano)	0	0		2		2		2		2			2				
				Jumlah produk hewan segar berkenasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0		1		1		1		1			1				
				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH/HPM (Dokumen)	0	0		50		50		50		50			50				
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap peneripan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0		30		30		30		30			30				
				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah obina untuk peneripan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0		5		5		5		5			5				
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				-		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.000		457.882.000		
			Terawasnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laboran)	1	0	-	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.000		457.882.000		
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				-		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.000		457.882.000		
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1	0	-	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.000		457.882.000		
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				-		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.981.000		91.576.000		
			Terbinanya unit usaha produk hewan dalam peneripan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah obina untuk peneripan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	0	-	5	15.000.000	5	16.500.000	5	18.150.000	5	19.965.000	5	21.981.000		91.576.000		
		3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit				-		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		122.102.000		

Tujuan		Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Terkecilnya Penerbitan Rekomendasi Pemantauan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/ISKPH HPM (Dokumen) SKKH/ISKPH/UMUK/HPM	Jumlah Rekomendasi Pemantauan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/ISKPH HPM (Dokumen)	0	0	-	50	20.000.000	50	22.000.000	50	24.200.000	50	26.620.000	50	29.282.000		122.102.000				
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				-		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		183.153.000				
			Teraksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	-	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000		183.153.000				
		3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				-		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.000		457.882.000				
			Teraksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	0	-	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.000		457.882.000				
		3.27.04.2.04.0009	Pembihaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkeamanan				-		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		61.051.000				
			Teraksananya kegiatan Pembihaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkeamanan	Jumlah produk hewan segar berkeamanan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	0	0	-	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		61.051.000				
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				-		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.000		91.576.000				
			Teraksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	0	-	30	15.000.000	30	16.500.000	30	18.150.000	30	19.965.000	30	21.961.000		91.576.000				
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-		267.693.000		294.463.000		323.909.000		356.300.000		391.930.000		1.634.295.000				
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	0	-	100	267.693.000	100	294.463.000	100	323.909.000	100	356.300.000	100	391.930.000		1.634.295.000	3.27.0.0.0.0.0.0.01.00000 -			
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	0		100						100									
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Kota				-		267.693.000		294.463.000		323.909.000		356.300.000		391.930.000		1.634.295.000				
			Teraksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	0	-	1	267.693.000	1	294.463.000	1	323.909.000	1	356.300.000	1	391.930.000		1.634.295.000				
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dilaporkan (Ha)	0	0		50						50									
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0		5.000						5.000									
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-		153.193.000		171.013.000		190.739.000		212.571.000		237.496.000		965.012.000				
			Terkendainya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	7.619	0	-	5.000	153.193.000	5.000	171.013.000	5.000	190.739.000	5.000	212.571.000	5.000	237.496.000		965.012.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target						Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		0				50	50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.880.000		60.000.000		275.505.000					
			Terangannya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Diawasi (Ha)	0		0		50	50.000.000		52.500.000	50	55.125.000	50	57.880.000	50	60.000.000		275.505.000					
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							64.500.000		70.950.000		78.045.000		85.849.000		94.434.000		393.778.000					
			Terangannya pasc bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laboran)	0		0	1		64.500.000	1	70.950.000	1	78.045.000	1	85.849.000	1	94.434.000		393.778.000					
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					33.296.226		97.750.000		112.525.000		123.777.000		129.497.000		142.446.000		639.291.226					
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100		100	33.296.226	100	97.750.000	100	112.525.000	100	123.777.000	100	129.497.000	100	142.446.000		639.291.226	3.27.0.00.0.00.01.0000 -				
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					33.296.226		49.250.000		54.175.000		59.592.000		58.896.000		64.786.000		319.995.226					
			Terlaksananya rekomendasi Izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	0		0		1	49.250.000	1	54.175.000	1	59.592.000	1	58.896.000	1	64.786.000		319.995.226					
									2		1				0										
									9		9				9										
									141		141				141										
		3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian							5.000.000		5.500.000		6.050.000			0	0		16.550.000					
			Terlaksananya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		0		0		2	5.000.000	1	5.500.000	0	6.050.000	0	0	0	0		16.550.000					
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian							11.250.000		12.375.000		13.612.000		14.973.000		16.471.000		68.681.000					
			Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0		0		9	11.250.000	9	12.375.000	9	13.612.000	9	14.973.000	9	16.471.000		68.681.000					
		3.27.06.2.01.0004	Sertifikasi unit usaha pembibitan/budidaya Ternak							3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.983.000		4.392.000		18.315.000					
			Terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	0		0		1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.983.000	1	4.392.000		18.315.000					
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian							30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		216.449.226					
			Terbina dan terawasnya penerapan standar dan Izin usaha pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laboran)	121		141	33.296.226	141	30.000.000	141	33.000.000	141	36.300.000	141	39.930.000	141	43.923.000		216.449.226					
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Polong Hewan							36.000.000		44.600.000		49.060.000		53.984.000		59.360.000		242.984.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Terbnyia rekomendasi Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	0	0	0	5	36.000.000	5	44.600.000	5	49.060.000	5	53.964.000	5	59.360.000		242.984.000				
				Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		30		30			30		30								
				Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laboran)	0	0		10		10			10		10								
				Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0		0		1			1		1								
				Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laboran)	0	0		10		10			10		10								
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)					7.500.000		8.250.000			9.075.000		9.982.000		10.980.000		45.787.000			
			Teraksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	0	0	0	5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	9.982.000	5	10.980.000		45.787.000				
		3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laboran)			0	10	7.500.000	10	8.250.000	10	9.075.000	10	9.982.000	10	10.980.000		45.787.000				
		3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)					13.500.000		14.850.000			16.335.000		17.968.000		19.765.000		82.418.000			
			Terawasiya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0	0	30	13.500.000	30	14.850.000	30	16.335.000	30	17.968.000	30	19.765.000		82.418.000				
		3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)			0	0	0	0		5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		23.205.000			
			Terawasiya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000		23.205.000			
		3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan (Laboran)					7.500.000		8.250.000			9.075.000		9.982.000		10.980.000		45.787.000			
			Terawasiya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah Izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan (Laboran)	0	0	0	10	7.500.000	10	8.250.000	10	9.075.000	10	9.982.000	10	10.980.000		45.787.000				
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang Diawasi (Laboran)					12.500.000		13.750.000			15.125.000		16.637.000		18.300.000		76.312.000			
			Terawasiya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang Diawasi (Laboran)	0	0	0	15	12.500.000	15	13.750.000	15	15.125.000	15	16.637.000	15	18.300.000		76.312.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2025			2026			2027			2028			2029			2030				
						Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target			Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
				Jumlah Izin Usaha Penggerak Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laboran)	0		0		2	5.000.000			2			6.655.000					30.525.000				
		3.27.06.2.03.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Penggerak Obat Hewan					-																	
			Terasilasiya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Penggerak Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Penggerak Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laboran)	0		0	-	2	5.000.000			2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.000		30.525.000					
		3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penggerak Obat Hewan					-		7.500.000						9.982.000				45.787.000					
			Terawasiya Pelaksanaan Izin Usaha Penggerak Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Penggerak Obat Hewan yang Diawasi (Laboran)	0		0	-	15	7.500.000			15	9.075.000	15	9.982.000	15	10.980.000		45.787.000					
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					534.263.218		4.221.000.000				4.867.080.000		4.889.288.000		5.794.715.000		24.399.146.218					
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	6,98	20,78	534.263.218	20,78	4.221.000.000			29,17	4.092.800.000	38,81	4.867.080.000	53,45	4.889.288.000	66,67	5.794.715.000		24.399.146.218	3.27.0.00.0.00.01.00000 -			
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	80	80		80					80			80		83,33							
				Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik (%)	100	100		100				100				100		100							
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					534.263.218		4.221.000.000				4.867.080.000		4.889.288.000		5.794.715.000		24.399.146.218					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pelugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	534.263.218	1	4.221.000.000			1	4.092.800.000	1	4.867.080.000	1	4.889.288.000	1	5.794.715.000		24.399.146.218				
					0	0		5				5				5		5							
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	38	0		11				11				11		11							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	0		78				63				63		63							
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya(Orang)	0	0		50				50				50		50							
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.350	1.459		1.459				1.500		1.550		1.600		1.700							
				Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	0		15				15				15		15							
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15		15				15				15		15							
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				431.562.200			1.091.000.000			1.200.100.000		1.320.110.000		1.452.121.000		1.597.333.000		7.092.226.200				
			Teraksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15	431.562.200	15	1.091.000.000			15	1.200.100.000	15	1.320.110.000	15	1.452.121.000	15	1.597.333.000		7.092.226.200				
		3.27.07.2.01.0001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				102.701.018			1.675.000.000			1.457.500.000		1.998.250.000		1.763.575.000		2.386.432.000		9.383.458.018				
			Teraksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.350	1.459	102.701.018	1.459	1.675.000.000			1.500	1.457.500.000	1.550	1.998.250.000	1.600	1.763.575.000	1.700	2.386.432.000		9.383.458.018				
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-			318.000.000			214.500.000		235.950.000		259.545.000		285.499.000		1.313.494.000				
			Tersedia dan Termantapnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	0	0	-	78	318.000.000			63	214.500.000	63	235.950.000	63	259.545.000	63	285.499.000		1.313.494.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					-		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000		3.357.805.000		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	38		0	-	11	550.000.000	11	605.000.000	11	665.500.000	11	732.050.000	11	805.255.000		3.357.805.000		
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian					-		152.000.000		167.200.000		183.920.000		202.312.000		222.543.000		927.975.000		
			Kapasitas penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0		0	-	50	152.000.000	50	167.200.000	50	183.920.000	50	202.312.000	50	222.543.000		927.975.000		
		3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota					-		375.000.000		382.500.000		390.750.000		399.825.000		409.807.000		1.957.882.000		
			Teraksanannya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0		0	-	15	375.000.000	15	382.500.000	15	390.750.000	15	399.825.000	15	409.807.000		1.957.882.000		
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					-		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		183.153.000		
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0		0	-	5	30.000.000	5	33.000.000	5	36.300.000	5	39.930.000	5	43.923.000		183.153.000		
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi, Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					-		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		183.153.000		
			Ternyatafaktanya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasi oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0		0	-	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000		183.153.000		

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. Hantaman yang luar biasa terhadap sektor ekonomi saat ini butuh penanganan yang insidentil dan hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada adalah optimalisasi dari belanja pemerintah karena 3 (tiga) indikator lainnya; investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor impor terus melambat dan tumbuh negatif sampai saat ini. Artinya optimalisasi belanja pemerintah adalah harapan terbesar agar aktivitas ekonomi terus berjalan. Kegiatan-kegiatan strategis yang distimuluskan dalam Renja ini merupakan salah satu optimalisasi belanja pemerintah dimaksud dan semoga angka-angka ini dapat bertahan dan terealisasi kedepannya.

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan/indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Dinas Pertanian tahun 2026 masih menitikberatkan pada peningkatan produksi pertanian dari aspek ketersediaan benih/bibit bersertifikat, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian (pra panen, panen dan pasca panen), sumber-sumber air irigasi dan peningkatan SDM penyuluh

pertanian lapangan, medik veteriner, para medik veteriner, kelompok tani dan petani sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029 dan usulan masyarakat.

Namun demikian apabila ternyata didalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak cukup Dinas Pertanian akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Demikian Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini kami susun dengan harapan dapat diwujudkan melalui dokumen-dokumen penganggaran selanjutnya. Terimakasih.